



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WIALAYAH VII

LAPORAN KEUANGAN

TAHUNAN 2024 AUDITED

Bagan Anggaran :
022.05.1600.KD.465678

Tahun Anggaran :
2024





KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH VII

JL. MARSMA R. ISWAHYUDI
BALIKPAPAN 76115

TELP. : (0542) 763002
: (0542) 763022
FAX. : (0542) 763012

e-mail : kobuwilayahvii@yahoo.co.id

Nomor : **KU. 204 / 0015 / KOBU-VII- 2025** Balikpapan, **7** Mei 2025
Klasifikasi :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Penyampaian Laporan Keuangan
Tahun 2024 (Audited).

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
Tipe A1 Balikpapan

Mendasari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Bab II Pasal 9 bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya dan memperhatikan kegiatan pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 (Audited), dengan hormat disampaikan Laporan Keuangan Tahun 2024 (Audited) berupa :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Neraca
3. Laporan Operasional (LO)
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
5. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai bahan laporan dan evaluasi, bersama ini dengan hormat disampaikan Laporan Keuangan Tahun 2024 (Audited) Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII Balikpapan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor,

Imron Jazuli

NIP. 19700711 199703 1 007

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Bab II Pasal 9 bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII sebagai salah satu entitas akuntansi di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, melakukan penyusunan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang akan disampaikan kepada Unit Eselon I.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas / pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Balikpapan, 05 Mei 2025

Kepala Kantor,



Imron Jazuli

NIP. 19700711 199703 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii-iii
Pernyataan Tanggung Jawab	iv
Ringkasan Laporan	v-vi
I Laporan Realisasi Anggaran	1
II Laporan Operasional	2
III Laporan Perubahan Ekuitas	3
IV Neraca	4-5
V Catatan Atas Laporan Keuangan	6
A. Penjelasan Umum	6
A.1 Profil dan Kebijakan Teknis	
A.2 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	
A.3 Basis Akuntansi	
A.4 Dasar Pengukuran	
A.5 Kebijakan Akuntansi	
B. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	13
B.1 Pendapatan	
B.1.1 Penerimaan Pajak	
B.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak	
B.2 Belanja	
B.2.1 Belanja Pegawai	
B.2.2 Belanja Barang	
B.2.3 Belanja Modal	
B.2.4 Belanja Bantuan Sosial	
B.2.5 Catatan Penting Lainnya Laporan Realisasi Anggaran	
C. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca	22
C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran	
C.2 Kas di Bendahara Penerimaan	
C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas	
C.4 Beban Dibayar Dimuka (prepaid)	
C.5 Uang Muka Belanja (prepayment)	
C.6 Pendapatan yang Masih Harus Diterima	
C.7 Piutang Bukan Pajak	
C.8 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	
C.9 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	
C.10 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	
C.11 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	
C.12 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	
C.13 Persediaan	
C.14 Persediaan yang Belum Diregister	
C.15 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	
C.16 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	
C.17 Piutang Jangka Panjang lainnya	
C.18 Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang	
C.19 Tanah	
C.20 Tanah Belum Diregister	
C.21 Peralatan dan Mesin	
C.22 Peralatan dan Mesin Belum Diregister	
C.23 Gedung dan Bangunan	
C.24 Gedung dan Bangunan Belum Diregister	
C.25 Jalan, Irigasi dan Jaringan	
C.26 Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister	

C.27	Aset Tetap Lainnya	
C.28	Aset Tetap yang Belum Diregister	
C.29	Konstruksi Dalam Pengerjaan	
C.30	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	
C.31	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	
C.32	Aset Tak Berwujud	
C.33	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	
C.34	Aset Lain-lain	
C.35	Aset Lainnya yang Belum Diregister	
C.36	Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	
C.37	Utang kepada Pihak Ketiga	
C.38	Utang Yang Belum Ditagihkan	
C.39	Hibah Yang Belum Disahkan	
C.40	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	
C.41	Pendapatan Diterima Dimuka	
C.42	Uang Muka dari KPPN	
C.43	Utang Jangka Pendek Lainnya	
C.44	Ekuitas	
C.45	Catatan Penting Lainnya neraca	
D.	Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional	43
D.1	Pendapatan Negara Bukan Pajak	
D.2	Beban Pegawai	
D.3	Beban Persediaan	
D.4	Beban Barang dan Jasa	
D.5	Beban Pemeliharaan	
D.6	Beban Perjalanan Dinas	
D.7	Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	
D.8	Beban Bantuan Sosial	
D.9	Beban Penyusutan dan Amortisasi	
D.10	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	
D.11	Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	
D.12	Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	
D.13	Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	
D.14	Pos Luar Biasa	
D.15	Catatan Penting Lainnya Laporan Operasional	
E.	Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	51
E.1	Ekuitas Awal	
E.2	Surplus (Defisit) LO	
E.3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	
E.4	Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	
E.5	Transaksi Antar Entitas	
E.6	Ekuitas Akhir	
F.	Pengungkapan Penting Capaian Rincian Output dan Prioritas Nasional	
F.1	Capaian Rincian Output	54
F.2	Prioritas Nasional	56
VI.	Lampiran	



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH VII**

JL. MARSMA R. ISWAHYUDI NO.1
BALIKPAPAN 76115

TELP. : (0542) 763002
: (0542) 763022
FAX : (0542) 763012

Email :
kobuwilayahvii@yahoo.co.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan 2024 (Audited) sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Balikpapan, 05 Mei 2025
Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran,



Imron Jazuli

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19700711 199703 1 007

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII, Tahunan 2024 (Audited) ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1.877.527.629; berupa pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1.877.527.629; atau mencapai 85.46 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp2.197.057.000.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp42.490.892.523; atau mencapai 91.62 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp46.378.733.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2024. Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp677.228.237.058; yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp190.389.220; Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp675.955.364.566; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp1.082.483.272,-

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp1.082.483.272; dan Rp676.145.753.786;

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.824.227.412; sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp40.110.864.954; sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp-38.286.637.542; Defisit Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp718.996.984; dan sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-39.005.634.526,-.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2024 adalah sebesar Rp674.560.937.728,- dikurangi Defisit-LO sebesar Rp-39.005.634.526,- kemudian dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp-22.914.310,- dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp40.613.364.894,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp676.145.753.786,-.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Laporan Keuangan Tahunan (Audited) 2024

Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana Strategis
Dasar Hukum

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII

Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

Tugas utamanya melaksanakan pengendalian, dan pengawasan kegiatan penerbangan di bandar udara di wilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Penerbangan Nasional dan Internasional yang berlaku. Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII diharapkan dapat menjamin keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 231 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara. Maka Kedudukan Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII adalah sebagai berikut:

1. Tugas

Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan penerbangan di bandar udara dalam wilayah kerja.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan terhadap keselamatan, keamanan, kelancaran, serta kenyamanan penerbangan di bandar udara;
- b. Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintahan di bandar udara;
- c. Pelaksanaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan di bidang fasilitas, pelayanan dan pengoperasian bandar udara;
- d. Pelaksanaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan penggunaan lahan daratan dan/atau perairan bandar udara sesuai dengan rencana induk bandar udara;
- e. Pelaksanaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan penggunaan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) serta Daerah Lingkungan Kepentingan Bandar Udara (DLKP);
- f. Pelaksanaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan standar kinerja operasional pelayanan bandar udara, angkutan udara, keamanan penerbangan, pesawat udara dan navigasi penerbangan;
- g. Pelaksanaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pelestarian lingkungan bandar udara;

- h. Pelaksanaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan di bidang angkutan udara, kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara di Bandar udara, pelaksanaan ketentuan mengenai organisasi perawatan pesawat udara, serta sertifikasi kompetensi dan lisensi personel pengoperasian pesawat udara;
- i. Pemberian sertifikat kelaikudaraan standar lanjutan (continuous airworthiness certificate) untuk pesawat udara bukan kategori transport (non transport category) atau bukan niaga (non commercial);
- j. Pelaksanaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan dibidang keamanan penerbangan dan pelayanan darurat di Bandar udara;
- k. Pelaksanaan urusan administrasi dan kerumah tanggaan Kantor Otoritas Bandar Udara.

Struktur Organisasi

- | | |
|--|--|
| 1. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII (Eselon III.a) | : IMRON JAZULI
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19700711 199703 1 007 |
| 2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Eselon IV.a) | : TARMADI
Pembina (IV/a)
NIP. 19720529 199303 1 001 |
| 3. Kepala Seksi Pelayanan & Pengoperasian Bandar Udara (Eselon IV.a) | : AHADIAT ADHI YUDISTIRA
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19820219 201012 1 002 |
| 4. Kepala Seksi Keamanan, Angkutan Udara Dan Kelaikudaraan (Eselon IV.a) | : ABDUL FAQIH
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19790529 200212 1 001 |

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

URAIAN	Catatan	TA 2024		% thd Angg	TA 2023 REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI		
PENDAPATAN DAN HIBAH	B.1				
Penerimaan Perpajakan	B.1.1	-	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.2	-	1.877.527.629	-	1.689.612.064
JUMLAH PENDAPATAN		-	1.877.527.629	-	1.689.612.064
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.2.1	-	13.869.876.695	-	11.097.795.769
Belanja Barang	B.2.2	-	22.299.127.143	-	19.301.731.025
Belanja Modal	B.2.3	-	6.521.888.685	-	775.017.126
Belanja Bantuan Sosial	B.2.4	-	-	-	-
JUMLAH BELANJA		-	42.490.892.523	-	31.174.543.920

Balikpapan, 5 Mei 2025
 Kepala Kantor

Irroh Jazuli
 NIP. 19760711 199703 1 007

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2024	2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Perpajakan	D.1	-	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.2	1.824.227.412	1.689.612.037
Jumlah Pendapatan		1.824.227.412	1.689.612.037
BEBAN			
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.3	13.669.876.695	11.097.795.769
Beban Persediaan	D.4	525.511.842	623.481.956
Beban Barang dan Jasa	D.5	9.463.059.667	8.796.992.702
Beban Pemeliharaan	D.6	3.625.216.019	3.851.969.539
Beban Perjalanan Dinas	D.7	8.717.041.775	6.117.683.746
Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.8	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.9	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.10	4.110.158.956	4.872.428.938
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.11	-	-
Jumlah Beban		40.110.864.954	35.360.352.650
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(38.286.637.542)	(33.670.740.613)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	D.12	(718.997.201)	-
Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	D.13	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.14	217	27
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		(718.996.984)	27
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		(39.005.634.526)	(33.670.740.586)
Pos Luar Biasa	D.15		
Pendapatan PNPB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
		-	-
SURPLUS/DEFISIT - LO		(39.005.634.526)	(33.670.740.586)

Balikpapan, 5 Mei 2025

Kepala Kantor



Imron Jazuli

NIP. 19700711 199703 1 007

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	2024	2023
EKUITAS AWAL	E.1	674.560.937.728	678.503.031.150
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	(39.005.634.526)	(33.670.740.586)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3	-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4	(22.914.310)	113.132.208
Penyesuaian Nilai Aset	E.41	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	E.42	-	-
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.43	-	-
Selisih Revaluasi Aset	E.44	-	-
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	E.45	(22.914.310)	113.132.208
Koreksi Lain-Lain	E.46	-	-
Jumlah		(22.914.310)	113.132.208
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	40.613.364.894	29.615.514.956
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		1.584.816.058	(3.942.093.422)
EKUITAS AKHIR	E.6	676.145.753.786	674.560.937.728



Balikpapan, 5 Mei 2025
Kepala Kantor

Imron Jazuli
NIP. 19700711 199703 1 007

NERACA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

URAIAN	Catatan	2024	2023
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.4	-	-
Uang Muka Belanja (prepayment)	C.5	-	-
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.6	-	-
Piutang Perpajakan	C.7	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan	C.8	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.9	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.10	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.11	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan	C.12	-	-
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.13	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan P	C.14	-	-
Persediaan	C.15	190.389.220	181.668.582
Persediaan yang Belum Diregister	C.16	-	-
Jumlah Aset Lancar		190.389.220	181.668.582
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.17	-	-
Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	C.18	-	-
Piutang Jangka Panjang lainnya	C.19	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang	C.20	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
PROPERTI INVESTASI			
Properti Investasi	C.21	-	-
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	C.22	-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.23	600.937.678.000	600.937.678.000
Tanah Belum Diregister	C.24	-	-
Peralatan dan Mesin	C.25	46.309.416.581	45.307.129.104
Peralatan dan Mesin Belum Diregister	C.26	-	-
Gedung dan Bangunan	C.27	74.819.298.712	72.212.896.035
Gedung dan Bangunan Belum Diregister	C.28	-	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.29	9.811.897.072	9.622.906.866
Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister	C.30	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.31	493.689.027	-
Aset Tetap yang Belum Diregister	C.32	-	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.33	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.34	(56.416.614.826)	(53.701.340.859)
Aset Konsesi Jasa	C.35	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa	C.36	-	-
Jumlah Aset Tetap		675.955.364.566	674.379.269.146
ASET LAINNYA			
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	C.37	-	-
Aset Tak Berwujud	C.38	1.007.600.000	1.007.600.000
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	C.39	-	-
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.40	1.082.483.272	84.200.000
Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri	C.41	-	-
Aset Lain-lain	C.42	-	-
Aset Lainnya yang Belum Diregister	C.43	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.44	(1.007.600.000)	(1.007.600.000)
Jumlah Aset Lainnya		1.082.483.272	84.200.000
JUMLAH ASET		677.228.237.058	674.645.137.728
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.45	1.082.483.272	84.200.000
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.46	-	-
Hibah Yang Belum Disahkan	C.47	-	-

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	C.48	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	C.49	-	-
Uang Muka dari KPPN	C.50	-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.51	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		1.082.483.272	84.200.000
Kewajiban Konsesi Jasa	C.52	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		1.082.483.272	84.200.000
EKUITAS			
Ekuitas	C.53	676.145.753.786	674.560.937.728
JUMLAH EKUITAS		676.145.753.786	674.560.937.728
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		677.228.237.058	674.645.137.728

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana Strategis
Dasar Hukum

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII

Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

Tugas utamanya melaksanakan pengendalian, dan pengawasan kegiatan penerbangan di bandar udara di wilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Penerbangan Nasional dan Internasional yang berlaku. Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII diharapkan dapat menjamin keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 231 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara. Maka Kedudukan Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII adalah sebagai berikut:

1. Tugas

Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan penerbangan di bandar udara dalam wilayah kerja.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan terhadap keselamatan, keamanan, kelancaran, serta kenyamanan penerbangan di bandar udara;
- b. Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintahan di bandar udara;
- c. Pelaksanaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan di bidang fasilitas, pelayanan dan pengoperasian bandar udara;
- d. Pelaksanaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan penggunaan lahan daratan dan/atau perairan bandar udara sesuai dengan rencana induk bandar udara;
- e. Pelaksanaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan penggunaan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) serta Daerah Lingkungan Kepentingan Bandar Udara (DLKP);
- f. Pelaksanaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan standar kinerja operasional pelayanan bandar udara, angkutan udara, keamanan penerbangan, pesawat udara dan navigasi penerbangan;
- g. Pelaksanaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pelestarian lingkungan bandar udara;

- h. Pelaksanaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan di bidang angkutan udara, kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara di Bandar udara, pelaksanaan ketentuan mengenai organisasi perawatan pesawat udara, serta sertifikasi kompetensi dan lisensi personel pengoperasian pesawat udara;
- i. Pemberian sertifikat kelaikudaraan standar lanjutan (continuous airworthiness certificate) untuk pesawat udara bukan kategori transport (non transport category) atau bukan niaga (non commercial);
- j. Pelaksanaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan dibidang keamanan penerbangan dan pelayanan darurat di Bandar udara;
- k. Pelaksanaan urusan administrasi dan kerumah tanggaan Kantor Otoritas Bandar Udara.

Struktur Organisasi

- | | |
|--|--|
| 1. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara
Wilayah VII (Eselon III.a) | : IMRON JAZULI
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19700711 199703 1 007 |
| 2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
(Eselon IV.a) | : TARMADI
Pembina (IV/a)
NIP. 19720529 199303 1 001 |
| 3. Kepala Seksi
Pelayanan & Pengoperasian
Bandar Udara (Eselon IV.a) | : AHADIAT ADHI YUDISTIRA
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19820219 201012 1 002 |
| 4. Kepala Seksi
Keamanan, Angkutan Udara Dan
Kelaikudaraan (Eselon IV.a) | : ABDUL FAQIH
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19790529 200212 1 001 |

A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan periode 31 Desember 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI atau Sistem Akuntansi Instansi saat ini sudah menggunakan aplikasi terintegrasi berbasis web yaitu SAKTI. SAIBA dan SIMAK digantikan modul-modul yang ada di SAKTI yaitu kelompok modul pelaporan yang terdiri dari modul piutang, modul persediaan, modul aset dan modul GLP.

A.3 BASIS AKUNTANSI

Menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai proses historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 187/PB/2017 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, terdapat perubahan akun-akun terutama pada akun pendapatan negara bukan pajak.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan / atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada adalah sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
 - b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dinilai dengan menggunakan metode perhitungan First In First Out (FIFO). Dalam metode FIFO, persediaan yang masuk terlebih dahulu dianggap sebagai persediaan yang pertama kali keluar. Dengan demikian, nilai persediaan keluar dicatat sesuai dengan urutan (*sequential*) masuk persediaan. Penggunaan Metode Penilaian FIFO ini sesuai dengan PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan. Sebagaimana diatur dalam PMK 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, dampak perubahan metode penilaian ini bersifat prospektif. Diterapkan untuk seluruh jenis persediaan (masing-masing persediaan per kode barang) dan seluruh jenis transaksi persediaan keluar.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapasitas sebagai berikut :
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapasitas tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklafikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN / BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Perhitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 Tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Penggolongan Masa manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas, Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-Lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek**
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang**
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai normal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja, antara lain :

Uraian	2024	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	2.197.057.000	-
Jumlah Pendapatan	2.197.057.000	-
Belanja		
Belanja Pegawai	13.769.885.000	-
Belanja Barang	24.432.707.000	-
Belanja Modal	8.176.141.000	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah Belanja	46.378.733.000	-

Realisasi Pendapatan
Rp1.877.527.629

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.877.527.629 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0. Pendapatan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar Rp0 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1.877.527.629. Pendapatan ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya Operasional di bandara sudah normal kembali, sehingga berdampak pada peningkatan jumlah PAS yang dikeluarkan oleh Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII sehingga meningkatnya pendapatan negara serta pendapatan dari penjualan tanah, gedung dan bangunan dan pendapatan dari sewa tanah, gedung dan bangunan dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2024		%
	Anggaran	Realisasi	
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	1.877.527.629	-
Jumlah	-	1.877.527.629	-

Realisasi Penerimaan Pajak mengalami kenaikan sebesar 0,00 persen dan Penerimaan Negara Bukan Pajak mengalami kenaikan sebesar 11,12 persen dibanding tahun sebelumnya. Rincian pendapatan adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	1.877.527.629	1.689.612.064	11,12
Jumlah	1.877.527.629	1.689.612.064	11,12

B.1.1 Penerimaan Pajak

Realisasi Penerimaan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing- masing sebesar Rp0 dan Rp0. Penerimaan Pajak TA TA 2024 sebesar 0,00 dari TA 2023 . Rincian Penerimaan Pajak adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Penerimaan Pajak	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Adapun rincian Penerimaan Pajak adalah sebagai berikut :

Perbandingan Rincian Realisasi Penerimaan Pajak Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Pendapatan Pajak Penghasilan	-	-	-
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	-	-	-
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	-	-	-
Pendapatan BPHTB	-	-	-
Pendapatan Cukai	-	-	-
Pendapatan Pajak Lainnya	-	-	-
Pendapatan Bea Masuk	-	-	-
Pendapatan Bea Keluar	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-
Pengembalian Pendapatan	-	-	-
Pendapatan Pajak/Bea Cukai	-	-	-

B.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.877.527.629 dan Rp1.689.612.064. Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 11,12 dari TA 2023 Operasional di bandara sudah normal kembali, sehingga berdampak pada peningkatan jumlah PAS yang dikeluarkan oleh Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII sehingga meningkatnya pendapatan negara serta pendapatan dari penjualan tanah, gedung dan bangunan dan pendapatan dari sewa tanah, gedung dan bangunan.. Rincian

Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	1.877.527.629	1.689.612.064	11,12
Jumlah	1.877.527.629	1.689.612.064	11,12

Sedangkan Rincian PNBPN Lainnya adalah sebagai berikut :

Perbandingan Rincian PNBPN Lainnya Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Pendapatan Jasa Kebandarudaraan	1.585.975.000	1.356.125.000	16,95
Pendapatan Sewa Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasidi Bidang Perhubungan	-	-	-
Pendapatan Jasa Perkapalan dan Kepelautan	-	-	-
Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	143.200.000	308.100.000	(53,52)
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	-	-	-
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	217	27	703,70
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	53.300.000	-	-
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	95.052.412	25.387.037	274,41
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	1.877.527.629	1.689.612.064	11,12

B.2 Belanja

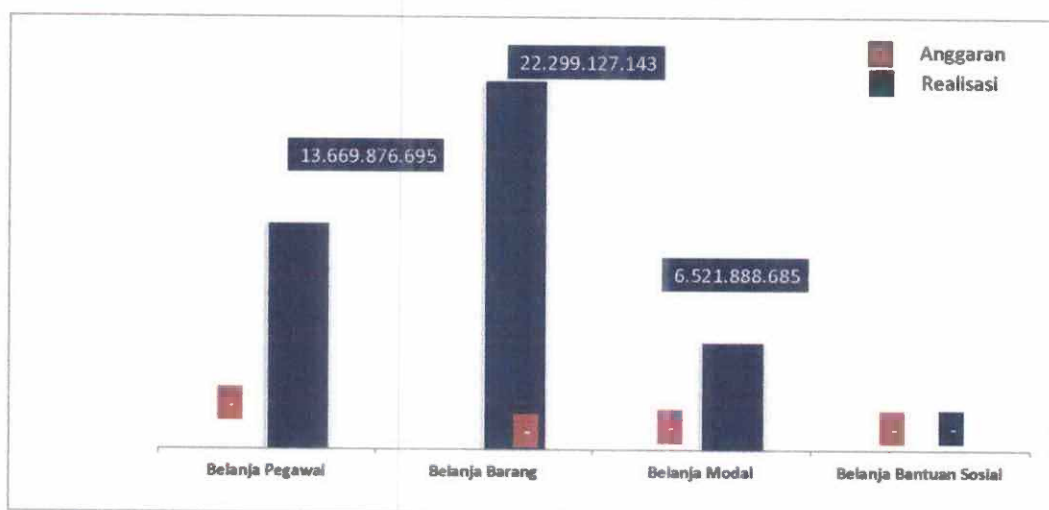
Realisasi Belanja pada TA 2024 adalah sebesar Rp42.490.892.523 atau 0,00 % dari anggaran belanja sebesar Rp.0 Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahunan (Audited) TA 2024

URAIAN	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2024		
	Anggaran	Realisasi	% thdp Angg.
Belanja Pegawai	-	13.669.876.695	-
Belanja Barang	-	22.299.127.143	-
Belanja Modal	-	6.521.888.685	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	-	42.490.892.523	-

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Komposisi Anggaran dan Realisasi Tahun 2024



Dibandingkan dengan TA 2023, Realisasi Belanja TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 36,30% Realisasi Belanja mengalami kenaikan hal ini disebabkan realisasi belanja barang mengalami kenaikan anggaran serta lebih optimal dalam penyerapan anggaran. Berikut rincian realisasi belanja TA 2024 dan

Perbandingan Realisasi Belanja Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Pegawai	13.669.876.695	11.097.795.769	23,18
Belanja Barang	22.299.127.143	19.301.731.025	15,53
Belanja Modal	6.521.888.685	775.017.126	741,52
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	42.490.892.523	31.174.543.920	36,30

B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp13.669.876.695 dan Rp11.097.795.769. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 23,18 % dari TA 2023. Hal ini disebabkan Kenaikan Belanja Pegawai disebabkan bertambahnya Pegawai (CPNS) sebanyak 14 orang dan PPPK sebanyak 2 orang untuk pembayaran belanja pegawai dibayarkan pada Tahun Anggaran 2024 serta adanya Kenaikan Gaji Berkala dan Kenaikan Pangkat Pegawai

Perbandingan Belanja Pegawai Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Gaji Pokok PNS	4.193.393.900	3.407.998.700	23,05
Belanja Pembulatan Gaji PNS	78.079	66.845	16,81
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	222.184.990	207.916.220	6,86
Belanja Tunj. Anak PNS	72.445.728	65.081.534	11,32
Belanja Tunj. Struktural PNS	35.280.000	39.060.000	(9,68)
Belanja Tunj. Fungsional PNS	-	-	-
Belanja Tunj. PPh PNS	15.644.392	1.836.783	751,73
Belanja Tunj. Beras PNS	222.256.980	208.931.700	6,38
Belanja Uang Makan PNS	601.949.000	601.921.000	0,00
Belanja Tunjangan Umum PNS	246.140.000	211.575.000	16,34
Belanja Uang Lembur	264.149.000	276.142.000	(4,34)
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	7.533.587.831	6.077.266.497	23,96
	-	-	-
Jumlah Belanja kotor	13.670.249.813	11.097.796.279	23,18
Pengembalian Belanja Pegawai	373.118	510	73.060,39
Jumlah Belanja	13.669.876.695	11.097.795.769	23,18

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp22.299.127.143 dan Rp19.301.731.025. Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Realisasi Belanja Barang TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 15,53% dari Realisasi TA 2023.

Hal ini antara lain disebabkan oleh Kenaikan Belanja Barang disebabkan adanya penambahan kegiatan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII

Perbandingan Belanja Barang Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Barang Operasional	4.920.894.538	5.462.910.113	(9,92)
Belanja Barang Non Operasional	2.471.395.724	1.302.662.150	89,72
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	540.290.520	539.973.868	0,06
Belanja Jasa	2.030.346.607	2.031.420.439	(0,05)
Belanja Pemeliharaan	3.619.157.979	3.847.080.709	(5,92)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	8.717.041.775	6.117.683.746	42,49
Belanja Perjalanan Luar Negeri	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	22.299.127.143	19.301.731.025	15,53
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	22.299.127.143	19.301.731.025	15,53

Adapun informasi alokasi anggaran belanja untuk penanganan pandemi covid-19 adalah sebagai berikut :

Jumlah pagu anggaran yang dialokasikan untuk penanganan pandemi covid-19 adalah sebesar Rp0. Anggaran tersebut terserap sebesar Rp0 dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja Barang untuk Penangan Pandemi Covid-19 TA 2024

URAIAN	Anggaran	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19		-	-
Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19		-	-
Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19		-	-
Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19		-	-
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19		-	-
Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

Realisasi Belanja Modal
Rp6.521.888.685

B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp6.521.888.685 dan Rp775.017.126. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 741,52% dibandingkan TA 2023 disebabkan oleh Realisasi Belanja Modal lebih tinggi karena pagu anggaran belanja modal tahun 2024 lebih besar dibanding tahun 2023.

Perbandingan Belanja Modal Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.365.292.977	104.388.800	2.165,85
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.156.595.708	670.628.326	519,81
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Belanja Modal Lainnya	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	6.521.888.685	775.017.126	741,52
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	6.521.888.685	775.017.126	741,52

Realisasi Belanja Modal
Tanah Rp0

B. 2.3.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2024 sebesar 0,00% dibandingkan TA 2023. Hal ini disebabkan oleh .

Perbandingan Belanja Modal Tanah Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

Realisasi Belanja Modal
Peralatan dan Mesin
Rp2.365.292.977

B.2.3.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp2.365.292.977 dan Rp104.388.800, mengalami kenaikan sebesar 2.165,85 % bila dibandingkan dengan realisasi TA 2023. Hal ini disebabkan oleh Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin lebih tinggi karena adanya pengadaan berupa WTP , Vidiotron, AC standing, Ac Split, kulkas, tempat tidur, kompos gas dan komputer pegawai.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.365.292.977	104.388.800	2.165,85
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	2.365.292.977	104.388.800	2.165,85
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	2.365.292.977	104.388.800	2.165,85

Realisasi Belanja Modal
Gedung dan Bangunan
Rp4.156.595.708

B.2.3.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp4.156.595.708 dan Rp670.628.326 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 519,81% dibandingkan Realisasi TA 2023. Belanja Gedung dan Bangunan ini berasal dari Karena pada Tahun Anggaran 2024 ada renovasi ruang kerja, adanya pemeliharaan drainase, pagar lingkungan Kantor Otban VII, perbaikan toilet dan Pembangunan Guest House sebanyak 8 unit.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.156.595.708	670.628.326	519,81
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	4.156.595.708	670.628.326	519,81
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	4.156.595.708	670.628.326	519,81

Realisasi Belanja Modal,
Jalan, Irigasi dan
Jaringan Rp0

B.2.3.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal, Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, sebesar 0,00 % dibandingkan Realisasi TA 2023. Hal ini disebabkan .

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Modal Jaringan	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

Realisasi Belanja Modal
Lainnya Rp0

B.2.3.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya per tanggal per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, sebesar 0,00 % dibandingkan Realisasi TA 2023. Hal ini disebabkan .

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Modal Lainnya	-	-	-
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya dan/atau Aset Lainnya dari	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.2.4 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2024 sebesar 0,00 % dibandingkan TA 2023. Belanja Bantuan Sosial .

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial Dalam Bentuk Uang - Penanganan Pandemi	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.2.5 Catatan Penting Lainnya Laporan Realisasi Anggaran

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

Keterangan	TAHUN 2024	TAHUN 2023
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

Penjelasan tentang Kas Di Bendahara Pengeluaran :

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Kas di Bendahara Penerimaan Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

Keterangan	TAHUN 2024	TAHUN 2023
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

Penjelasan tentang Kas Di Bendahara Penerimaan :

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP sementara setara kas adalah investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Kas Lainnya dan Setara Kas Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

Keterangan	TAHUN 2024	TAHUN 2023
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

Penjelasan tentang Kas Lainnya dan Setara Kas :

Belanja Dibayar Dimuka
(prepaid) Rp0

C.4 Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)

Saldo Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) merupakan hak yang masih diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) disajikan sebagai berikut

Rincian Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

Keterangan	TAHUN 2024	TAHUN 2023
Beban Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
Jumlah	-	-

Penjelasan tentang Belanja Dibayar Dimuka :

Uang Muka Belanja
(prepayment) Rp0

C.5 Uang Muka Belanja (prepayment)

Saldo Uang Muka Belanja (prepayment) per tanggal per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka Belanja (prepayment) merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Uang Muka Belanja (prepayment) adalah sebagai berikut :

Rincian Uang Muka Belanja (prepayment) Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

Keterangan	TAHUN 2024	TAHUN 2023
	-	-
	-	-
	-	-
Jumlah	-	-

Penjelasan tentang Uang Muka Belanja :

Pendapatan yang Masih
Harus Diterima Rp0

C.6 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing masing adalah sebesar Rp0. dan Rp0. Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan penerimaan di masa yang akan datang (dalam waktu 1 tahun) yang telah diakui dan dicatat sebagai pendapatan pemerintah pada periode berjalan, karena manfaat atas aset, barang, dan/atau jasa pemerintah telah diterima oleh

Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

Keterangan	TAHUN 2024	TAHUN 2023
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
Jumlah	-	-

Penjelasan tentang Pendapatan yang Masih Harus Diterima :

C.7 Piutang Perpajakan

Nilai Piutang Perpajakan per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Perpajakan merupakan piutang yang timbul akibat adanya pendapatan pajak pusat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan keuangan. Rincian Piutang Perpajakan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Piutang Perpajakan Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

Jenis Piutang	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
Jumlah	-	-

C.8 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang pajak . Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Pajak	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Pajak			
Lancar	-	0,5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-

C.9 Piutang Bukan Pajak

Nilai Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Piutang Bukan Pajak Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

Jenis Piutang	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023
Piutang Lainnya	-	-
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	-
Jumlah	-	-

C.10 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak Tahunan (Audited) TA 2024

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0.5%	#VALUE!
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		#VALUE!

C.11 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan dengan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran tersebut adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

Jenis	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023
-	-	-
Jumlah	-	-

C.12 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing masing adalah sebesar masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan estimasi atas ketidaktertagihan bagian lancar TPA&. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran tersebut adalah sebagai berikut :

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Tahunan (Audited)
TA 2024 dan 2023

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0.5%	#VALUE!
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		#VALUE!

Bagian Lancar Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan
Ganti Rugi Rp0

C.13 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan TP/TGR yang belum direalisasikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi tersebut adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

Jenis	TAHUN 2024	TAHUN 2023
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih - Bagian
Lancar Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan
Ganti Rugi Rp0

C.14 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing masing adalah sebesar masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan estimasi atas ketidaktertagihan bagian lancar tagihan TP/TGR &. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi tersebut adalah sebagai berikut :

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0.5%	#VALUE!
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		#VALUE!

Persediaan
Rp190.389.220

C.15 Persediaan

Nilai Persediaan tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp190.389.220 dan Rp181.668.582. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

Jenis	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023
Barang Konsumsi	189.939.260	181.554.182
Bahan untuk Pemeliharaan	449.960	114.400
Jumlah	190.389.220	181.668.582

Persediaan tersebut di atas dalam Realisasi pada Tahun Anggaran 2024 lebih tinggi dari Tahun Anggaran 2023 karena pegawai pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII bertambah dari Tahun Anggaran sebelumnya sehingga kebutuhan barang konsumsi dan bahan untuk pemeliharaan meningkat

Penjelasan terkait dengan persediaan dalam rangka penanganan pandemi covid-19

Persediaan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 merupakan sisa persediaan yang dibeli sendiri atau berasal dari transfer dan hibah yang masih bersaldo dalam keadaan baik dan siap pakai pada tanggal 31 Desember 2024. Berikut ini daftar persediaan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19.

Rincian Persediaan dalam rangka Penanganan pandemi COVID-19

No.	Nama Barang Persediaan	Jumlah Unit	Nilai Rupiah
1			
2			
3			
4			
Jumlah		-	-

Persediaan yang Belum
Diregister Rp0

C.16 Persediaan yang Belum Diregister

Nilai Persediaan yang Belum Diregister per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Piutang Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan
Ganti Rugi Rp0

C.17 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Nilai Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

Debitur	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023
-	-	-
Jumlah	-	-

Piutang Tagihan
Penjualan Angsuran
Rp0

C.18 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran

Nilai Piutang Tagihan Penjualan Angsuran per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Piutang Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2024 untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Tagihan Penjualan Angsuran Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

Debitur	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

Piutang Jangka Panjang
lainnya Rp0

C.19 Piutang Jangka Panjang lainnya

Nilai Piutang Jangka Panjang lainnya per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Jangka Panjang lainnya adalah piutang yang bersumber dari peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 (duabelas) bulan sejak tanggal pelaporan namun tidak dapat dikategorikan sebagai piutang jangka panjang atas tagihan penjualan angsuran, TP/TGR, penerusan pinjaman dan kredit pemerintah. Rincian Piutang Jangka Panjang lainnya per 31 Desember 2024 untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Jangka Panjang lainnya Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023
Piutang Jangka Panjang lainnya	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

C.20 Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang per 31 Desember 2024 untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Panjang	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	0%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Tagihan PA			
Lancar	-	-	-
Kurang Lancar	-	-	-
Diragukan	-	-	-
Macet	-	-	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

C.21 Properti Investasi

Nilai Properti Investasi per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Properti Investasi 31 Desember 2024 untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Properti Investasi Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

U R A I A N	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023
	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

C.21 Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

Nilai Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Akumulasi Penyusutan Properti Investasi merupakan kontra akun Aset Properti Investasi yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Properti Investasi.

C.23 Tanah

Nilai aset tetap berupa Tanah yang dimiliki per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp600.937.678.000 dan Rp600.937.678.000. Nilai Tanah tersebut . Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	600.937.678.000
Mutasi tambah :	
Reklasifikasi Masuk	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
Mutasi kurang :	
Transfer Keluar	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
Saldo per 31 Desember 2024	600.937.678.000

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah Tahunan (Audited) TA 2024

No.	Luas	Lokasi	Nilai
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
4	-	-	-
Jumlah			-

Penjelasan tentang kondisi Tanah

Tanah Belum
Diregister Rp0

C.24 Tanah Belum Diregister

Nilai aset tetap berupa Tanah Belum Diregister yang dimiliki per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Peralatan dan Mesin
Rp46.309.416.581

C.25 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp46.309.416.581 dan Rp45.307.129.104.

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	45.307.129.104
Mutasi tambah:	
Pembelian	2.365.292.977
Transfer masuk	-
Reklasifikasi Keluar	-
Koreksi Pencatatan	-
Mutasi Kurang:	
Penghentian Aset dari penggunaannya	1.358.005.500
Saldo per 31 Desember 2024	46.309.416.581
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2024	(40.475.574.564)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	5.833.842.017

Mutasi transaksi penambahan peralatan mesin berupa :

a. Water Treatment (Mesin Proses)	599.600.000
b. Lemari Besi/Metal	11.766.000
c. Box Camera	9.546,00
d. Display	45.000,00
e. Kasur/Spring Bed	4.400.000
f. Meubelair Lainnya	294.500.000
g. Lemari Es	21.250.000
h. A.C. Split	47.600.000
i. Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	279.300.000
j. Kompor Gas (Alat Dapur)	8.000.000
k. Tabung Gas	5.000.000
l. Televisi	64.936.600
m. Bracket Standing Peralatan	9.935.166
n. Audio Visual	199.492.896
o. Stand Speaker	4.750.800
p. TV Monitor	397.000.000
q. Lap Top	253.800,00
r. Personal Komputer Lainnya	14.430.000
s. Printer (Peralatan Personal Komputer)	54.985.515

Mutasi transaksi pengurangan peralatan mesin berupa :

a. Mesin Pembuat ID Card	451.043.000
b. X-Ray Machine & Control	829.741.800
c. Walk Through Metal Detector (WTMD)	77.220.700

Peralatan dan Mesin
Belum Diregister
Rp0

C.26 Peralatan dan Mesin Belum Diregister

Nilai Peralatan dan Mesin Belum Diregister per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp0 dan Rp0.

Gedung dan
Bangunan
Rp74.819.298.712

C.27 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp74.819.298.712 dan Rp72.212.896.035. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	72.212.896.035
Mutasi tambah:	
Pembelian	3.249.567.548
Koreksi pencatatan nilai bertambah	188.926.129
Mutasi Kurang:	
Penghentian Aset dari penggunaannya	832.091.000
Saldo per 31 Desember 2024	74.819.298.712
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	-10.589.029.633
Nilai Buku per 31 Desember 2024	64.230.269.079

Mutasi transaksi penambahan Gedung dan Bangunan berupa :

- | | |
|---|------------------|
| a. Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen | 3.249.567.548,00 |
| b. Koreksi pencatatan nilai bertambah berupa kapitaliasi nilai aset | 188.926.129,00 |

Mutasi transaksi pengurangan Gedung dan Bangunan berupa :

- | | |
|--|----------------|
| a. Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen | 188.926.129,00 |
|--|----------------|

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini

Gedung dan
Bangunan Belum
Diregister Rp0

C.28 Gedung dan Bangunan Belum Diregister

Saldo Gedung dan Bangunan Belum Diregister per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan Belum Diregister pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp9.811.897.072

C.29 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp.9.811.897.072 dan Rp.9.622.906.866. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	9.622.906.866
Mutasi tambah:	
pembelian	188.990.206
	-
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per 31 Desember 2024	9.811.897.072
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	-5.352.010.629
Nilai Buku per 31 Desember 2024	4.459.886.443

Mutasi transaksi penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa :

a. Bak Penampung/Kolam/ Menara Penampungan 188.990.206

Mutasi transaksi pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa :

-

Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister
Rp0

C.30 Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Aset Tetap Lainnya
Rp493.689.027

C.31 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp.493.689.027 dan Rp.0. Aset tetap tersebut . Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	0
Mutasi tambah:	
pembelian	682.615.156
	-
Mutasi Kurang:	
Koreksi Nilai Pencatatan	188.926.129
	-
Saldo per 31 Desember 2024	493.689.027
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	493.689.027
Nilai Buku per 31 Desember 2024	493.689.027

Mutasi transaksi penambahan Aset Tetap Lainnya berupa :

a. Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi 672.686.544
b. Aset Tetap Lainnya Dalam Renovasi 9.928.612

Mutasi transaksi pengurangan Aset Tetap Lainnya berupa :

a.Koreksi Nilai Pencatatan 188.926.129

Aset Tetap yang Belum Diregister
Rp0

C.32 Aset Tetap yang Belum Diregister

Saldo Aset Tetap yang Belum Diregister per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp.0 dan Rp.0.

C.33 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan aset tetap yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Mutasi transaksi pada Konstruksi Dalam Pengerjaan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	-
Mutasi tambah:	
Perolehan/Penambahan KDP	-
	-
	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
	-
	-
	-
Saldo per 31 Desember 2024	-

Rincian lebih lanjut terkait Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam lampiran.

C.34 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing Rp56.416.614.826 dan Rp53.701.340.859. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahunan (Audited) Tahun 2024

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	46.309.416.581	(40.475.574.564)	5.833.842.017
2	Gedung dan Bangunan	74.819.298.712	(10.589.029.633)	64.230.269.079
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	9.811.897.072	(5.352.010.629)	4.459.886.443
4	Aset Tetap Lainnya	493.689.027	-	493.689.027
Akumulasi Penyusutan		131.434.301.392	(56.416.614.826)	75.017.686.566

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan keuangan ini.

C.35 Aset Konsesi Jasa

Saldo Aset Konsesi Jasa per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing Rp0 dan Rp0. Aset Konsesi Jasa merupakan aset yang digunakan untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi dalam suatu perjanjian konsesi jasa baik yang disediakan oleh mitra atau disediakan oleh pemberi konsesi. Rincian Aset Konsesi Jasa per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Aset Konsesi Jasa Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

U R A I A N	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
Jumlah	-	-

C.37 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Saldo Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp0 dan Rp0. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga merupakan kemitraan berupa perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau usaha yang dimiliki. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga pada . Adapun rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga adalah sebagai berikut:

Rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Tahunan (Audited) Tahun 2024

No	U r a i a n	Jumlah
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Jumlah		-

C.38 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp1.007.600.000 dan Rp1.007.600.000. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII berupa Software.

Mutasi Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai per 1 Januari 2024		1.007.600.000
Mutasi tambah:		
Transfer Masuk		-
		-
		-
		-
Mutasi Kurang:		
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan		-
		-
		-
		-
		-
Saldo Nilai per 31 Desember 2024		1.007.600.000
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2024		(1.007.600.000)
Nilai Buku per 31 Desember 2024		-

Mutasi transaksi penambahan/pengurangan Aset Tak Berwujud sebagai berikut :

a.	-
b.	-
c.	-
d.	-
e.	-

C.39 Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

Saldo Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan merupakan aset tak berwujud yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. . Mutasi transaksi pada Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per		-
Mutasi tambah:		
		-
		-
Mutasi Kurang:		
		-
		-
Saldo per		-

C.40 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Nilai Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.082.483.272 dan Rp84.200.000. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya merupakan dana yang telah dikeluarkan dari rekening kas negara dan pengeluarannya telah membebani pagu anggaran (telah dicatat sebagai realisasi anggaran), namun demikian dana tersebut masih dalam penguasaan pemerintah dan belum dibayarkan kepada pihak ketiga walaupun peruntukannya telah ditentukan. Adapun rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Uraian	T.A. 2024	T.A. 2023
Dana Lainnya	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Total	-	-

Penjelasan Dana Yang Dibatasi Penggunaannya :

-

C.41 Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri

Nilai Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri merupakan dana cadangan yang diberikan oleh Bendahara Umum Negara kepada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usul Menteri sebagai dana yang dicatat di luar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Perwakilan Republik Indonesia Adapun rincian Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri

Uraian	T.A. 2024	T.A. 2023
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Total	-	-

Penjelasan Dana Cadangan Perwakilan RI :

-

C.42 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2024	-
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-
	-
	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
	-
	-
	-
Saldo per 31 Desember 2024	-
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2024	-
Nilai Buku per 31 Desember 2024	-

Transaksi penambahan dan pengurangan Aset Lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

Mutasi Tambah

-	-
-	-
-	-

Mutasi Kurang

-	-
-	-
-	-

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada lampiran Laporan Keuangan ini.

C.43 Aset Lainnya yang Belum Diregister

Saldo Aset Lainnya yang Belum Diregister per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp0 dan Rp0.

Akumulasi Penyusutan
dan Amortisasi Aset
Lainnya 1.007.600.000

C.44 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp1.007.600.000 dan Rp1.007.600.000. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Sedangkan Amortisasi Aset Lainnya merupakan akumulasi amortisasi tak berwujud yang mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui pemerintah dari sejak diperoleh atau atau dibeli oleh satker. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Aset Tak Berwujud	1.007.600.000	(1.007.600.000)	-
Aset Lain-lain	-	-	-
-	-	-	-
Total	1.007.600.000	(1.007.600.000)	-

Utang kepada Pihak
Ketiga
Rp1.082.483.272

C.45 Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.082.483.272 dan Rp84.200.000. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :.

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A.2023
Beban Pegawai yang Masih Harus Dibayar	-	-
Beban Barang yang Masih Harus Dibayar	-	-
	-	-
	-	-
Total	-	-

Penjelasan tentang Utang kepada Pihak Ketiga :

1. Pembayaran RPATA PEMBANGUNAN GEDUNG OPERASIONAL sesuai BAST Nomor 01/OBU.VII-PPK.BAST.KONTRAK/XII/2024 Tanggal 28-12-2024 BAP Nomor 04/OBU.VII-PPK.BAP.KONTRAK/XII/2024 Tanggal 28-12-2024 Nilai Rp 742.019.974 2. Pembayaran RPATA PEMBANGUNAN GEDUNG OPERASIONAL sesuai BAST Nomor 1/OBU.VII-PPK.BAST.KONTRAK/XII/2024 Tgl 28-12-2024 BAP Nomor 05/OBU.VII-PPK.BAP.KONTRAK/XII/2024 Tgl 29-12-2024 Nilai Rp 157.510.750 Jaminan Pemeliharaan No. 111051104122403538 Tgl. 28-12-2024. 3. Pembayaran RPATA OUTSOURCING CLEANING SERVICE sesuai BAST Nomor 12/OBU.VII-PPK.BAST.CS/XII/2024 Tanggal 31-12-2024 BAP Nomor 12/OBU.VII-PPK.BAP.CS/XII/2024 Tanggal 31-12-2024 Nilai Rp 83.600.000. 4. Pembayaran RPATA PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG OPERASIONAL sesuai BAST Nomor 11/OBU.VII-PPK.BAST.SPK/XII/2024 Tanggal 28-12-2024 BAP Nomor 11/OBU.VII-PPK.BAP.SPK/XII/2024 Tanggal 28-12-2024 nilai Rp 99.352. 548 BG Nomor 004/BG-PB/BPD-BPP/2024 Tanggal 30-12-2024.

C.46 Utang Yang Belum Ditagihkan

Nilai Utang Yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan transaksi atas pengakuan utang karena adanya BAST dari pihak ketiga. Adapun rincian Utang Yang Belum Ditagihkan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Utang Yang Belum Ditagihkan

Uraian	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A.2023
Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	-	-
	-	-
	-	-
Total	-	-

Penjelasan tentang Utang Yang Belum Ditagihkan :

Kwitansi UP yang belum di SPJ - kan Rp.82.640.900,- dan Pembayaran Belanja Barang Pemeliharaan Drainase dan Pagar Lingkungan Komplek Otban VII Rp.97.144.651,-.

C.47 Hibah Yang Belum Disahkan

Nilai Hibah Yang Belum Disahkan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Hibah Yang Belum Disahkan merupakan hibah yang belum disahkan ke KPPN sampai dengan tanggal pelaporan. Adapun rincian Hibah Yang Belum Disahkan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Hibah Yang Belum Disahkan

Uraian	Jumlah
	-
	-
Jumlah	-

Penjelasan tentang Hibah Yang Belum Disahkan :

Utang Kelebihan
Pembayaran
Pendapatan Rp0

C.48 Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan sebagai berikut :

Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A.2023
	-	-
	-	-
Total	-	-

Penjelasan Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan :

Pendapatan Diterima
Dimuka Rp0

C.49 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka sebagai berikut :

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A.2023
	-	-
	-	-
	-	-
Total	-	-

Penjelasan tentang Pendapatan Diterima Dimuka :

Uang Muka dari KPPN
Rp0

C.50 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Rincian Uang Muka dari KPPN adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah
Uang Persediaan	-
Tambahan Uang Persediaan	-
Total	-

Penjelasan tentang Uang Muka dari KPPN :

Uang persediaan

Utang Jangka Pendek Lainnya Rp0

C.51 Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan utang jangka pendek lain lain yang akan dilunasi dalam waktu kurang dari 12 bulan.

Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A.2023
	-	-
	-	-
	-	-
Total	-	-

Penjelasan tentang Utang Jangka Pendek Lainnya :

Kewajiban Konsesi Jasa Rp0

C.52 Kewajiban Konsesi Jasa

Saldo Kewajiban Konsesi Jasa per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Kewajiban Konsesi Jasa merupakan kewajiban yang muncul karena adanya perolehan aset konsesi jasa.

Rincian Kewajiban Konsesi Jasa adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A.2023
	-	-
	-	-
	-	-
Total	-	-

Penjelasan tentang Utang Jangka Pendek Lainnya :

Ekuitas Rp676.145.753.786

C.53 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp676.145.753.786. dan Rp674.560.937.728. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

C. 54 Catatan Penting Lainnya Neraca

Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB :

No	BAES1	Kode Sdkter	Nama Sdkter	Dok. Sumber	No Dokumen	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total	No. SP2D	Penjelasan
1	'02205	465678	KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH VII	BAST KONTRAKTUAL	'02/OBU.VII-PPK.BAST.SP/IV/2024	24-04-2024	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	PEKATAAN RUANG KERJA DAN RUANG MEETING KDBU VII	6070301001	1	188643617	188643617	'240471302003490	Ketidaksesuaian Kode Barang : Kesalahan Pencatatan dan Perekaman BAST pada modul Komitmen dengan No. Dokumen 01/OBU.VII-PPK.BAST.SP/IV/2024 dan 13/OBU.VII-PPK.BAST.SP/XII/2024, yang seharusnya dicatat menggunakan KDP (sistem pembayaran termin) dan Pengembangan Aset, sehingga ketika dilakukan pendetailan pada modul Aset menjadi 3 NUP diluar NUP Gedung Bangunan Kantor Permanen. Tindak Lanjut Koreksi: Dilakukan Reklasifikasi keluar terhadap 3 (tiga) BAST tersebut dan di Reklasifikasi Masuk untuk menggabungkan NUP dan menambah nilai Aset Renovasi Gedung ke dalam NUP Bangunan Gedung Kantor Permanen.
2	'02205	465678	KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH VII	BAST KONTRAKTUAL	'02/OBU.VII-PPK.BAST.SP/IV/2024	13-05-2024	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	RENOVASI DAN PENINGKATAN RUANGAN WTP DI PERUMAHAN KOBU VII	5020505001	1	188990206	188990206	'240471302006058	Kesalahan Pencatatan dan Perekaman BAST pada modul Komitmen dengan No. Dokumen 02/OBU.VII-PPK.BAST.SP/IV/2024 dan 16/OBU.VII-PPK.BAST.SP/XII/2024, yang seharusnya dicatat menggunakan KDP (sistem pembayaran termin) dan Pengembangan Aset, sehingga ketika dilakukan pendetailan pada modul Aset menjadi 3 NUP diluar NUP Gedung Bangunan Kantor Permanen. Tindak Lanjut Koreksi: Dilakukan Reklasifikasi keluar terhadap 2 (dua) BAST tersebut dan di Reklasifikasi Masuk untuk menggabungkan NUP dan menambah nilai Aset Renovasi dan Pengembangan Gedung ke dalam NUP Water Treatment (Mesin Proses)
3	'02205	465678	KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH VII	BAST KONTRAKTUAL	'03/OBU.VII-PPK.BAST.SP/IV/2024	18-05-2024	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	RENOVASI GEDUNG OPERASIONAL UNTUK RUANG KERJA	6070301001	1	188926129	188926129	'240471302008276	Ketidaksesuaian Kode Barang : Kesalahan Pencatatan dan Perekaman BAST pada modul Komitmen dengan No. Dokumen 03/OBU.VII-PPK.BAST.SP/IV/2024 dan 14/OBU.VII-PPK.BAST.SP/XII/2024, yang seharusnya dicatat menggunakan KDP (sistem pembayaran termin) dan Pengembangan Aset, sehingga ketika dilakukan pendetailan pada modul Aset menjadi 3 NUP diluar NUP Gedung Bangunan Kantor Permanen. Tindak Lanjut Koreksi: Dilakukan Reklasifikasi keluar terhadap 2 (dua) BAST tersebut dan di Reklasifikasi Masuk untuk menggabungkan NUP dan menambah nilai Aset Renovasi Gedung ke dalam NUP Bangunan Gedung Kantor Permanen.
4	'02205	465678	KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH VII	BAST KONTRAKTUAL	'04/OBU.VII-PPK.BAST.SP/IV/2024	16-05-2024	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	PENGGANTIAN ATAP GEDUNG B KANTOR OBU VII	6070301001	1	105863891	105863891	'240471302009322	Ketidaksesuaian Kode Barang : Kesalahan Pencatatan dan Perekaman BAST pada modul Komitmen dengan No. Dokumen 04/OBU.VII-PPK.BAST.SP/IV/2024 dan 15/OBU.VII-PPK.BAST.SP/XII/2024, yang seharusnya dicatat menggunakan KDP (sistem pembayaran termin) dan Pengembangan Aset, sehingga ketika dilakukan pendetailan pada modul Aset menjadi 3 NUP diluar NUP Gedung Bangunan Kantor Permanen. Tindak Lanjut Koreksi: Dilakukan Reklasifikasi keluar terhadap 2 (dua) BAST tersebut dan di Reklasifikasi Masuk untuk menggabungkan NUP dan menambah nilai Aset Renovasi Gedung ke dalam NUP Bangunan Gedung Kantor Permanen.
5	'02205	465678	KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH VII	BAST KONTRAKTUAL	'06/OBU.VII-PPK.BAST.SP/IV/2024	'06-06-2024	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	RENOVASI GEDUNG PELAYANAN PERIZINAN TERPADU LANTAI 1	6070301001	1	189252907	189252907	'240471302009941	Ketidaksesuaian Kode Barang : Kesalahan Pencatatan dan Perekaman BAST pada modul Komitmen dengan No. Dokumen 06/OBU.VII-PPK.BAST.SP/IV/2024 dan 17/OBU.VII-PPK.BAST.SP/XII/2024, yang seharusnya dicatat menggunakan KDP (sistem pembayaran termin) dan Pengembangan Aset, sehingga ketika dilakukan pendetailan pada modul Aset menjadi 3 NUP diluar NUP Gedung Bangunan Kantor Permanen. Tindak Lanjut Koreksi: Dilakukan Reklasifikasi keluar terhadap 2 (dua) BAST tersebut dan di Reklasifikasi Masuk untuk menggabungkan NUP dan menambah nilai Aset Renovasi Gedung ke dalam NUP Bangunan Gedung Kantor Permanen.
6	'02205	465678	KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH VII	BAST KONTRAKTUAL	'13/OBU.VII-PPK.BAST.SP/XII/2024	17-12-2024	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	PENGADAAN MEUBELAJR GEDUNG OPERASIONAL	3050205009	8	625000	5000000	'240471302015121	Ketidaksesuaian Kode Barang : Kesalahan Pencatatan dan Perekaman BAST pada modul Komitmen dengan No. Dokumen 01/OBU.VII-PPK.BAST.SP/IV/2024 dan 13/OBU.VII-PPK.BAST.SP/XII/2024, yang seharusnya dicatat menggunakan KDP (sistem pembayaran termin) dan Pengembangan Aset, sehingga ketika dilakukan pendetailan pada modul Aset menjadi 3 NUP diluar NUP Gedung Bangunan Kantor Permanen. Tindak Lanjut : Dilakukan Reklasifikasi keluar terhadap 3 (tiga) BAST tersebut dan di Reklasifikasi Masuk untuk menggabungkan NUP dan menambah nilai Aset Renovasi Gedung ke dalam NUP Bangunan Gedung Kantor Permanen.
7	'02205	465678	KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH VII	BAST KONTRAKTUAL	'13/OBU.VII-PPK.BAST.SP/IV/2024	'03-11-2024	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	PENATAAN RUANG KERJA DAN RUANG MEETING KDBU VII	6070501001	1	9928612	9928612	'240471302012308	Ketidaksesuaian Kode Barang : Kesalahan Pencatatan dan Perekaman BAST pada modul Komitmen dengan No. Dokumen 01/OBU.VII-PPK.BAST.SP/IV/2024 dan 13/OBU.VII-PPK.BAST.SP/XII/2024, yang seharusnya dicatat menggunakan KDP (sistem pembayaran termin) dan Pengembangan Aset, sehingga ketika dilakukan pendetailan pada modul Aset menjadi 3 NUP diluar NUP Gedung Bangunan Kantor Permanen. Tindak Lanjut Koreksi: Dilakukan Reklasifikasi keluar terhadap 3 (tiga) BAST tersebut dan di Reklasifikasi Masuk untuk menggabungkan NUP dan menambah nilai Aset Renovasi Gedung ke dalam NUP Bangunan Gedung Kantor Permanen.

8	02209	465678	KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH VII	BAST KONTRAKTUAL	*14/OBU.VII-PPK.BAST.SP/K/02/2024	25-11-2024	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	RENOVASI GEDUNG OPERASIONAL UNTUK RUANG KERJA	4010101001	1	9943481	9943481	*240471302013 280	Ketidakeesuaian Kode Barang : Kesalahan Pencatatan dan Perekaman BAST pada modul Komitmen dengan No. Dokumen 03/OBU.VII-PPK.BAST.SP/K/IV/2024 dan 14/OBU.VII-PPK.BAST.SP/K/II/2024, yang seharusnya dicatat menggunakan KDP (sistem pembayaran termin) dan Pengembangan Aset, sehingga ketika dilakukan pendetailan pada modul Aset menjadi 3 NUP diluar NUP Gedung Bangunan Kantor Permanen. Tindak Lanjut Koreksi: Dilakukan Reklasifikasi keluar terhadap 2 (dua) BAST tersebut dan di Reklasifikasi Masuk untuk menggabungkan NUP dan menambah nilai Aset Renovasi Gedung ke dalam NUP Bangunan Gedung Kantor Permanen.
9	02205	465678	KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH VII	BAST KONTRAKTUAL	*15/OBU.VII-PPK.BAST.SP/K/02/2024	25-11-2024	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	PENGANTARAN ATAP GEDUNG B KANTOR OBU VII	4010101001	1	5571784	5571784	*240471302013 334	Ketidakeesuaian Kode Barang : Kesalahan Pencatatan dan Perekaman BAST pada modul Komitmen dengan No. Dokumen 04/OBU.VII-PPK.BAST.SP/K/IV/2024 dan 15/OBU.VII-PPK.BAST.SP/K/II/2024, yang seharusnya dicatat menggunakan KDP (sistem pembayaran termin) dan Pengembangan Aset, sehingga ketika dilakukan pendetailan pada modul Aset menjadi 3 NUP diluar NUP Gedung Bangunan Kantor Permanen. Tindak Lanjut Koreksi: Dilakukan Reklasifikasi keluar terhadap 2 (dua) BAST tersebut dan di Reklasifikasi Masuk untuk menggabungkan NUP dan menambah nilai Aset Renovasi Gedung ke dalam NUP Bangunan Gedung Kantor Permanen.
10	02205	465678	KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH VII	BAST KONTRAKTUAL	*16/OBU.VII-PPK.BAST.SP/K/02/2024	28-11-2024	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	RENOVASI DAN PENINGKATAN RUANGAN WTP DI PERUMAHAN KOBU VII	4010101999	1	9946853	9946853	*240471302013 345	Ketidakeesuaian Kode Barang : Kesalahan Pencatatan dan Perekaman BAST pada modul Komitmen dengan No. Dokumen 02/OBU.VII-PPK.BAST.SP/K/IV/2024 dan 16/OBU.VII-PPK.BAST.SP/K/II/2024, yang seharusnya dicatat menggunakan KDP (sistem pembayaran termin) dan Pengembangan Aset, sehingga ketika dilakukan pendetailan pada modul Aset menjadi 3 NUP diluar NUP Gedung Bangunan Kantor Permanen. Tindak Lanjut Koreksi: Dilakukan Reklasifikasi keluar terhadap 2 (dua) BAST tersebut dan di Reklasifikasi Masuk untuk menggabungkan NUP dan menambah nilai Aset Renovasi dan Pengembangan Gedung ke dalam NUP Water Treatment (Mesin Proses).
11	02205	465678	KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH VII	BAST KONTRAKTUAL	*17/OBU.VII-PPK.BAST.SP/K/01/2024	14-12-2024	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	RENOVASI GEDUNG PELAYANAN PERIZINAN TERPADU LANTAI 1	4010101001	1	9960680	9960680	*240471302014 899	Ketidakeesuaian Kode Barang : Kesalahan Pencatatan dan Perekaman BAST pada modul Komitmen dengan No. Dokumen 06/OBU.VII-PPK.BAST.SP/K/IV/2024 dan 17/OBU.VII-PPK.BAST.SP/K/II/2024, yang seharusnya dicatat menggunakan KDP (sistem pembayaran termin) dan Pengembangan Aset, sehingga ketika dilakukan pendetailan pada modul Aset menjadi 3 NUP diluar NUP Gedung Bangunan Kantor Permanen. Tindak Lanjut Koreksi: Dilakukan Reklasifikasi keluar terhadap 2 (dua) BAST tersebut dan di Reklasifikasi Masuk untuk menggabungkan NUP dan menambah nilai Aset Renovasi Gedung ke dalam NUP Bangunan Gedung Kantor Permanen.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS OPERASIONAL

Pendapatan Perpajakan
Rp0

D.1 Pendapatan Perpajakan

Jumlah Pendapatan Perpajakan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi pendapatan perpajakan dari tahun sebelumnya sebesar 0,00. Hal tersebut disebabkan oleh . Rincian Pendapatan perpajakan tersebut adalah sebagai berikut :"

Rincian Pendapatan Perpajakan Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	2024	2023	%
Pendapatan Pajak Penghasilan	-	-	-
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	-	-	-
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	-	-	-
Pendapatan BPHTB	-	-	-
Pendapatan Cukai	-	-	-
Pendapatan Pajak Lainnya	-	-	-
Pendapatan Bea Masuk	-	-	-
Pendapatan Bea Keluar	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Pendapatan Negara
Bukan Pajak
Rp1.824.227.412

D.2 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp1.824.227.412 dan Rp1.689.612.037. Realisasi pendapatan negara bukan pajak mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 7,97. Hal tersebut disebabkan oleh Operasional di bandara normal kembali, sehingga berdampak pada peningkatan jumlah PAS serta Pendapatan dari Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak tersebut adalah sebagai berikut :"

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	2024	2023	%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	95.052.412	25.387.037,00	274,41
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana	-	-	-
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasidi	-	-	-
Pendapatan Jasa Kebandarudaraan	1.585.975.000	1.356.125.000,00	16,95
Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	143.200.000	308.100.000,00	(53,52)
	-	-	-
Jumlah	1.824.227.412,00	1.689.612.037,00	7,97

D.3 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp13.669.876.695 dan Rp11.097.795.769.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Beban Pegawai Tahun 2024 sebesar 23,18 persen dibandingkan dengan Tahun 2023 disebabkan oleh Kenaikan Belanja Pegawai disebabkan bertambahnya Pegawai (CPNS) sebanyak 14 orang dan PPPK sebanyak 2 orang untuk pembayaran belanja pegawai dibayarkan pada Tahun Anggaran 2024 serta adanya Kenaikan Gaji Berkala dan Kenaikan Pangkat Pegawai. Rincian Beban Pegawai Tahunan (Audited) Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pegawai Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Gaji Pokok PNS	4.193.393.900	3.407.998.700	23,05
Beban Pembulatan Gaji PNS	74.961	66.335	13,00
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	222.184.990	207.916.220	6,86
Beban Tunj. Anak PNS	72.445.728	65.081.534	11,32
Beban Tunj. Struktural PNS	35.280.000	39.060.000	(9,68)
Beban Tunj. Fungsional PNS	-	-	-
Beban Tunj. PPh PNS	15.644.392	1.836.783	751,73
Beban Tunj. Beras PNS	222.256.980	208.931.700	6,38
Beban Uang Makan PNS	601.949.000	601.921.000	0,00
Beban Tunjangan Umum PNS	245.770.000	211.575.000	16,16
Beban Uang Lembur	264.149.000	276.142.000	(4,34)
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	7.533.587.831	6.077.266.497	23,96
Belanja Gaji Pokok PPPk	79.852.900	-	-
Belanja Pembulatan Gaji PPPk	1.555	-	-
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	4.781.690	-	-
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	8.100.000	-	-
Belanja Tunjangan Beras PPPK	2.896.800	-	-
Belanja Uang Makan PPPK	11.803.000	-	-
Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatann/Kinerj	155.703.968	-	-
	-	-	-
Jumlah	13.669.876.695	11.097.795.769	23,18

D.4 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp525.511.842 dan Rp623.481.956

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi barang-barang yang habis dipakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 15,71 persen dibandingkan dengan Tahun 2023 disebabkan oleh Penurunann beban persediaan konsumsi disebabkan karena adanya pengurangan belanja bahan cetak pas persediaan konsumsi. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Persediaan konsumsi	525.511.842	623.421.456	(15,71)
Beban Persediaan Lainnya	-	-	-
Beban Persediaan bahan baku	-	60.500	(100,00)
Jumlah Beban Persediaan	525.511.842,00	623.481.956	(15,71)

D.5 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp9.463.059.667 dan Rp8.796.992.702.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 7,57 persen dibandingkan dengan Tahun 2023 disebabkan oleh Meningkatnya : 1. Beban Bahan dikarenakan meningkatnya pengendalian dan pelaporan, 2. Meningkatnya Beban langganan daya dan Jasa lainnya terdapat peningkatan dikarenakan kenaikan harga, 3. Meningkatnya beban sewa dikarenakan padatnya kegiatan di IKN sehingga bertambah beban sewa kendaraan operasional. Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Keperluan Perkantoran	2.419.613.300	2.495.875.901	(3,06)
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	9.052.650	-	-
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	5.292.000	7.067.800	(25,13)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	82.896.000	194.040.000	(57,28)
Beban Barang Operasional Lainnya	2.404.040.588	2.765.926.412	(13,08)
Beban Bahan	1.501.909.842	665.046.050	125,84
Beban Honor Output Kegiatan	57.073.524	79.070.000	(27,82)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	912.412.358	558.546.100	63,35
Beban Langganan Listrik	743.916.559	685.902.354	8,46
Beban Langganan Telepon	64.519.890	64.723.607	(0,31)
Beban Langganan Air	55.649.273	53.747.140	3,54
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	361.865.307	349.846.609	3,44
Beban Jasa Konsultan	-	99.332.000	(100,00)
Beban Sewa	804.395.578	683.018.229	17,77
Beban Jasa Lainnya	-	94.850.500	(100,00)
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi	-	-	-
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	5.000.000	-	-
Beban Gedung dan Bangunan-Ekstrakomptabel	35.422.798	-	-
Jumlah	9.463.059.667	8.796.992.702,00	7,57

D.6 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp3.625.216.019 dan Rp3.851.969.539.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 5,89 persen dibandingkan dengan Tahun 2023 disebabkan oleh Disebabkan karena adanya penurunan pagu anggaran untuk pemeliharaan gedung dan bangunan Rincian Beban Pemeliharaan untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pemeliharaan Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.678.606.232	2.373.393.016	(29,27)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.501.309.171	1.175.239.554	27,74
Beban Pemeliharaan Jaringan	242.878.725	162.879.139	49,12
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	6.058.040	4.888.830	23,92
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	196.363.851	135.569.000	44,84
Beban Persediaan suku cadang	-	-	-
Beban Persediaan suku cadang	-	-	-
Jumlah	3.625.216.019	3.851.969.539	(5,89)

D.7 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp8.717.041.775 dan Rp6.117.683.746

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 42,49 persen disebabkan oleh Kenaikan beban perjalanan dinas karena bertambahnya pegawai pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII dan meningkatnya pengawasan dan pengendalian serta kegiatan di bandara VVIP di IKN sebagai pendampingan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2024 dan 2023 :

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Perjalanan Biasa	8.599.644.295	5.830.453.246	47,50
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	10.880.000	(100,00)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	117.397.480	276.350.500	(57,52)
Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	-	-	-
Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	8.717.041.775,00	6.117.683.746	42,49

D.8 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang dan jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2024 sebesar 0,00 dibandingkan dengan Tahun 2023 disebabkan oleh. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A. 2023	%
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

D.9 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Bantuan Sosial Tahun 2024 sebesar 0,00 disebabkan oleh . Rincian Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Bantuan Sosial Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Barang/Jasa	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

D.10 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp4.110.158.956 dan Rp4.872.428.938.

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.889.800.726	2.643.324.854	(28,51)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.513.105.659	1.486.897.258	1,76
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	588.568.758	629.822.687	(6,55)
Beban Penyusutan Irigasi	47.969.017	41.669.343	15,12
Beban Penyusutan Jaringan	70.714.796	70.714.796	-
	-	-	-
Jumah Penyusutan	4.110.158.956	4.872.428.938	(15,64)
	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah	4.110.158.956	4.872.428.938	(15,64)

D.11 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Penyisihan Piutang PNB	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang PPh Non Migas	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang PPN	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Cukai dan Bea Materai	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Pajak Perdagangan Internasional	-	-	-
Jumlah	-	-	-

D.12 Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar

Jumlah Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp-718.997.201 dan Rp0

Rincian Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	-	-
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	53.300.000	-	-
Beban Kerugian Pelepasan Aset	(772.297.201)	-	-
Jumlah	(718.997.201,00)	-	-

Surplus (Defisit)
Penyelesaian Kewajiban
Jangka Panjang Rp0

D.13 Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

Jumlah Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Rincian Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Surplus (Defisit) dari
Kegiatan Non
Operasional Lainnya
Rp217

D.14 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp217 dan Rp27.

Rincian Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	217	27,00	703,70
	-	-	-
Penerimaan Kembali Beban Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-
Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	-	-	-
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	-	-	-
Jumlah	217,00	27	703,70

D.15 Pos Luar Biasa

Jumlah Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Pos Luar Biasa Tahunan (Audited) 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Pendapatan PNPB	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas	-	-	-
Beban Persediaan	-	-	-
-	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Terjadinya pos-pos luar biasa disebabkan sebagai berikut :

D.16 Rincian Beban Khusus Penanganan Pandemi Covid-19

Beban-beban yang khusus digunakan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dirinci sebagai berikut:

Rincian Beban Khusus Penanganan Covid-19 Tahunan (Audited) 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
	-	-	-
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Beban Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
	-	-	-
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Penjelasan tentang Beban Penanganan Covid-19 :

0

D.17 Catatan Penting Lainnya Laporan Operasional

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp.674.560.937.728,00

E.1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.674.560.937.728,00 dan Rp.678.503.031.150,00

Defisit LO
Rp.39.005.634.526,00

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.39.005.634.526,00 dan Rp.33.670.740.586,00. Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Dampak Kumulatif
Perubahan Kebijakan
Akuntansi/Kesalahan
Mendasar Rp.0,00*

E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

E.4 KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.-22.914.310 dan Rp.113.132.208 yaitu sebagai berikut .

Penyesuaian Nilai Aset
Rp.0,00

E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai Persediaan
Rp0,00

E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Persediaan	-
	-
Jumlah	-

*Koreksi Atas
Reklasifikasi Rp0,00*

E.4.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan koreksi atasatas reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	-
	-
Jumlah	-

Selisih Revaluasi Aset
Rp.0,00

E.4.4 Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

Revaluasi tersebut berasal dari

Selisih Revaluasi Nilai Aset Tetap mencerminkan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan Rincian untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tahun 2024

Jenis Aset	Nilai Koreksi
Ekuitas Transaksi Lainnya	-
Revaluasi Aset Tetap	-
	-
Jumlah	-

Koreksi Aset Tetap Non
Revaluasi Rp-
22.914.310

E.4.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.-22.914.310 dan Rp.113.132.208. .

Koreksi ini

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi per 31 Desember 2024

Jenis Aset Tetap Non Revaluasi	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Persediaan	-
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(22.914.310)
Jumlah	(22.914.310,0)

Koreksi Lain-Lain Rp0

E.4.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi Lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.. Koreksi ini adalah . Koreksi Lain-Lain terdiri dari :

Rincian Koreksi Lain-Lain Tahun 2024

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi Lainnya	-
	-
Jumlah	-

Transaksi Antar Entitas
Rp40.613.364.894

E.5 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.40.613.364.894 dan Rp.29.615.514.956. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian /Lembaga (KL), antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. terdiri dari :

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember2024

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	42.490.892.523
Diterima dari Entitas Lain	(1.877.527.629)
Transfer Keluar	-
Transfer Masuk	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
	-
Jumlah	40.613.364.894

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2024, DKEL sebesar Rp 42.490.892.523, sedangkan DDEL sebesar minus Rp 1.877.527.629

E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dengan BA-BUN.

Transfer Keluar sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp0 terdiri dari :

Rincian Transfer Keluar Tahun 2024

Jenis	Entitas Tujuan	Nilai
-	-	-
-	-	-
Jumlah		-

Sedangkan Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp0 yang terdiri dari :

Jenis	Entitas Asal	Nilai
-	-	-
-	-	-
Jumlah		-

E.5.3 Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar 0 dari total Rp0 yang akan diterima sepanjang tahun 2024

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar 0 dari total Rp0.

Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai
-	-	-
-	-	-
Total Pengesahan		-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-	-
Jumlah		-

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2024 disajikan pada lampiran

Ekuitas Akhir
Rp676.145.753.786

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.676.145.753.786,00 dan Rp.674.560.937.728,00.

E.7 Catatan Penting Lainnya Laporan Perubahan Ekuitas

F.1 PENGUNGKAPAN PENTING CAPAIAN RINCIAN OUTPUT

Capaian
Rincian
Output

Capaian Rincian Output menurut klasifikasi fungsi yang telah dicapai dalam pelaksanaan APBN TA 2024 pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII antara lain sebagai berikut:

LAPORAN KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2024

Kementerian/Lembaga : (022) Kementerian Perhubungan

Unit Organisasi : (05) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

Satuan Kerja : (465678) Kantor Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII Balikpapan

Kode	Uraian	BELANJA			KELUARAN				GAP	Referensi	Keterangan
		Pagu	Realisasi	Persentase	Target	Satuan	Realisasi Volume RO	Progres Capaian			
04	EKONOMI	46,378,733,000.00	42,491,285,641.00	91.62%							
06	TRANSPORTASI	46,378,733,000.00	42,491,285,641.00	91.62%							
GA	Program Infrastruktur Konktivitas	19,248,843,000.00	15,727,728,721.00	81.71%							
1980	Pelayanan Transportasi Udara	1,932,547,000.00	1,616,006,520.00	83.78%							
BF	Pengawasan dan Pengendalian Layanan	1,932,547,000.00	1,616,006,520.00	83.78%							
001	Layanan Pengawasan Bidang Angkutan Udara	1,227,288,000.00	1,125,491,472.00	91.71%	1.0000	Layanan	1.0000	100%	8.29%	(00)	KEGIATAN PENGAWASAN ANGKUTAN UDARA SUDAH TERLAKSANA DAN SESUAI RENCANA
002	Layanan Pengendalian Bidang Angkutan Udara	725,259,000.00	490,515,048.00	67.63%	1.0000	Layanan	1.0000	100%	32.37%	(01) Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran	KEGIATAN PENGENDALIAN ANGKUTAN UDARA SUDAH TERLAKSANA DAN ADA KEGIATAN YANG TERDAMPAK AUTOMATIC ADJUSTMENT (BLOKIR)
4645	Infrastruktur Konktivitas Transportasi Udara	10,197,954,000.00	8,020,270,885.00	78.65%							
BF	Pengawasan dan Pengendalian Layanan	2,289,813,000.00	1,743,873,635.00	76.18%							
001	Layanan Pengawasan Bidang Bandar Udara	1,648,910,000.00	1,588,542,385.00	96.39%	1.0000	Layanan	1.0000	100%	3.11%	(00)	KEGIATAN PENGAWASAN BANDAR UDARA SUDAH TERLAKSANA DAN SESUAI RENCANA
002	Layanan Pengendalian Bidang Bandar Udara	638,903,000.00	145,331,250.00	22.71%	1.0000	Layanan	1.0000	100%	77.29%	(01) Adanya efisiensi dan optimalisasi	KEGIATAN PENGENDALIAN BANDAR UDARA SUDAH TERLAKSANA DAN ADA KEGIATAN YANG TERDAMPAK AUTOMATIC ADJUSTMENT (BLOKIR)
CBE	Prasarana Bidang Konktivitas Udara	6,085,887,000.00	4,468,907,738.00	73.33%							
001	Bandar Udara	6,085,887,000.00	4,468,907,738.00	73.33%	1.0000	Unit	1.0000	100%	26.67%	(01) Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran	KEGIATAN PRASARANA BANDAR UDARA SUDAH SELESAI DAN ADA SEBAGIAN TIDAK TERLAKSANA KARNA TERDAMPAK AUTOMATIC ADJUSTMENT
CDE	Off Prasarana Bidang Konktivitas Udara	1,812,444,000.00	1,806,489,522.00	99.67%							
001	Perbaikan Prasarana Bandar Udara	1,812,444,000.00	1,806,489,522.00	99.67%	1.0000	Unit	1.0000	100%	0.33%	(00)	KEGIATAN PERBAIKAN PRASARANA BANDAR UDARA SUDAH TERLAKSANA
4646	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara	6,422,485,000.00	5,452,454,728.00	84.9%							
BF	Pengawasan dan Pengendalian Layanan	6,422,485,000.00	5,452,454,728.00	84.9%							
001	Layanan Pengawasan Bidang Keamanan Penerbangan	1,555,292,000.00	1,478,034,888.00	95.09%	1.0000	Layanan	1.0000	100%	4.91%	(00)	KEGIATAN PENGAWASAN KEAMANAN PENERBANGAN SUDAH TERLAKSANA
002	Layanan Pengendalian Bidang Keamanan Penerbangan	897,740,000.00	471,433,940.00	52.51%	1.0000	Layanan	1.0000	100%	47.49%	(01) Adanya efisiensi dan optimalisasi	KEGIATAN PENGENDALIAN KEAMANAN PENERBANGAN SUDAH SELESAI DAN ADA SEBAGIAN TIDAK TERLAKSANA KARNA TERDAMPAK AUTOMATIC ADJUSTMENT (BLOKIR)
003	Layanan Pengawasan Bidang Kelautudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara	1,713,055,000.00	1,557,118,133.00	90.9%	1.0000	Layanan	1.0000	100%	9.1%	(00)	KEGIATAN PENGAWASAN KELAUTUDARAAN DAN PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA SUDAH SELESAI
004	Layanan Pengendalian Bidang Kelautudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara	270,145,000.00	238,465,780.00	88.65%	1.0000	Layanan	1.0000	100%	11.35%	(00)	KEGIATAN PENGENDALIAN KELAUTUDARAAN DAN PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA SUDAH SELESAI DILAKSANAKAN
005	Layanan Pengawasan Bidang Navigasi Penerbangan	1,025,886,000.00	987,871,880.00	96.29%	1.0000	Layanan	1.0000	100%	3.71%	(00)	KEGIATAN PENGAWASAN NAVIGASI PENERBANGAN SUDAH SELESAI
006	Layanan Pengendalian Bidang Navigasi Penerbangan	980,337,000.00	717,800,285.00	74.72%	1.0000	Layanan	1.0000	100%	25.28%	(01) Adanya efisiensi dan optimalisasi	KEGIATAN PENGENDALIAN NAVIGASI PENERBANGAN SUDAH SELESAI DAN ADA SEBAGIAN TIDAK TERLAKSANA TERDAMPAK AUTOMATIC ADJUSTMENT
4647	Penujangan Teknis Transportasi Udara	675,877,000.00	638,986,580.00	94.54%							
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	675,877,000.00	638,986,580.00	94.54%							
655	Layanan Manajemen Keuangan	675,877,000.00	638,986,580.00	94.54%	1.0000	Dokumen	1.0000	100%	5.46%	(00)	KEGIATAN MANAJEMEN KINERJA INTERNAL SUDAH SELESAI

WA	Program Dukungan Manajemen	27,129,830,000.00	26,763,536,820.00	98.65%							
4611	Pengadaan Perencanaan, Keuangan, BBN Dan Umum Transportasi Utara	26,833,290,000.00	26,463,503,820.00	98.64%							
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	24,447,637,000.00	24,126,001,529.00	98.68%							
956	Layanan BBN	100,200,000.00	74,391,600.00	74.84%	1.0000	Layanan	1.0000	100%	25.16%	(99) Lainnya	KEGIATAN BBN SUDAH SELESAI DILAKSANAKAN
994	Layanan Perkantoran	24,347,637,000.00	24,061,009,929.00	98.78%	1.0000	Layanan	1.0000	100%	1.22%	(00)	KEGIATAN PERKANTORAN SUDAH SELESAI DILAKSANAKAN
E80	Layanan Manajemen Kinerja Internal	2,335,433,000.00	2,343,502,291.00	98.24%							
952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	648,118,000.00	645,486,309.00	99.75%	1.0000	Layanan	1.0000	100%	0.25%	(00)	KEGIATAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SUDAH SELESAI
955	Layanan Manajemen Keuangan	1,737,335,000.00	1,667,015,982.00	97.68%	1.0000	Layanan	1.0000	100%	2.32%	(00)	KEGIATAN MANAJEMEN KEUANGAN SUDAH SELESAI DILAKSANAKAN
4613	Pengadaan Organisasi Dan SDM Transportasi Utara	221,600,000.00	219,038,150.00	98.84%							
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	221,600,000.00	219,038,150.00	98.84%							
990	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	221,600,000.00	219,038,150.00	98.84%	1.0000	Layanan	1.0000	100%	1.16%	(00)	KEGIATAN ORGANISASI DAN TATA KELOLA INTERNAL SUDAH SELESAI DILAKSANAKAN
4614	Pengadaan Kerjasama Dan Kerjasama Transportasi Utara	75,000,000.00	74,996,950.00	100%							
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	75,000,000.00	74,996,950.00	100%							
958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	75,000,000.00	74,996,950.00	100%	1.0000	Layanan	1.0000	100%	0.00%	(00)	KEGIATAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN INFORMASI SUDAH SELESAI

F.2 PENGUNGKAPAN PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

Program Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik
Prioritas Indonesia Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, pada Kantor Otoritas Bandar Udara
Nasional Wilayah VII tidak terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional 7 Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam RKP. Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran dan Pencapaian Output dari masing-masing Prioritas Nasional adalah sebagai berikut:

1. Prioritas Nasional I – Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Pelaksanaannya di antaranya melalui program prioritas, ... kegiatan prioritas, yang tersebar di Satuan Kerja dengan pagu mencapai Rp..... dan realisasi sebesar Rp..... dengan rincian sebagai berikut.

Kementerian/Lembaga :
 Unit Organisasi :
 Satker :

Program / Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output Strategis	Target	Capaian Output Strategis	%

NIHIL

2. Prioritas Nasional II – Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Pelaksanaannya di antaranya melalui program prioritas, ... kegiatan prioritas, yang tersebar di Satuan Kerja dengan pagu mencapai Rp..... dan realisasi sebesar Rp..... dengan rincian sebagai berikut.

Kementerian/Lembaga :
 Unit Organisasi :
 Satker :

Program / Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output Strategis	Target	Capaian Output Strategis	%

NIHIL

3. Prioritas Nasional III – Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Pelaksanaannya di antaranya melalui program prioritas, ... kegiatan prioritas, yang tersebar di Satuan Kerja dengan pagu mencapai Rp..... dan realisasi sebesar Rp..... dengan rincian sebagai berikut.

Kementerian/Lembaga :
Unit Organisasi :
Satker :

Program / Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output Strategis	Target	Capaian Output Strategis	%

4. Prioritas Nasional IV – Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Pelaksanaannya di antaranya melalui program prioritas, ... kegiatan prioritas, yang tersebar di Satuan Kerja dengan pagu mencapai Rp..... dan realisasi sebesar Rp..... dengan rincian sebagai berikut

Kementerian/Lembaga :
Unit Organisasi :
Satker :

Program / Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output Strategis	Target	Capaian Output Strategis	%

5. Prioritas Nasional V – Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Pelaksanaannya di antaranya melalui program prioritas, ... kegiatan prioritas, yang tersebar di Satuan Kerja dengan pagu mencapai Rp..... dan realisasi sebesar Rp..... dengan rincian sebagai berikut.

Kementerian/Lembaga :
Unit Organisasi :
Satker :

Program / Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output Strategis	Target	Capaian Output Strategis	%

6. Prioritas Nasional VI – Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.

Pelaksanaannya di antaranya melalui program prioritas, ... kegiatan prioritas, yang tersebar di Satuan Kerja dengan pagu mencapai Rp..... dan realisasi sebesar Rp..... dengan rincian sebagai berikut.

Kementerian/Lembaga :
Unit Organisasi :
Satker :

Program / Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output Strategis	Target	Capaian Output Strategis	%

NIHIL

7. Prioritas Nasional VII – Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.
Pelaksanaannya di antaranya melalui program prioritas, ... kegiatan prioritas, yang tersebar di Satuan Kerja dengan pagu mencapai Rp..... dan realisasi sebesar Rp..... dengan rincian sebagai berikut.

Kementerian/Lembaga :
Unit Organisasi :
Satker :

Program / Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output Strategis	Target	Capaian Output Strategis	%

NIHIL

F.3 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR
SATUAN KERJA : (465678) KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH VII

Tgl Data : 02/05/25 2:32 AM
Tgl Cetak : 02/05/25 7:51 AM
Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Persediaan	190,389,220	181,668,582	8,720,638	4.80
JUMLAH ASET LANCAR	190,389,220	181,668,582	8,720,638	4.80
ASET TETAP				
Tanah	600,937,678,000	600,937,678,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	46,309,416,581	45,307,129,104	1,002,287,477	2.21
Gedung dan Bangunan	74,819,298,712	72,212,896,035	2,606,402,677	3.61
Jalan, Irigasi dan Jaringan	9,811,897,072	9,622,906,866	188,990,206	1.96
Aset Tetap Lainnya	493,689,027	0	493,689,027	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(56,416,614,826)	(53,701,340,859)	(2,715,273,967)	5.06
JUMLAH ASET TETAP	675,955,364,566	674,379,269,146	1,576,095,420	0.23
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	1,007,600,000	1,007,600,000	0	0.00
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	1,082,483,272	84,200,000	998,283,272	1,185.61
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(1,007,600,000)	(1,007,600,000)	0	0.00
JUMLAH ASET LAINNYA	1,082,483,272	84,200,000	998,283,272	1,185.61
JUMLAH ASET	677,228,237,058	674,645,137,728	2,583,099,330	0.38
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	1,082,483,272	84,200,000	998,283,272	1,185.61
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1,082,483,272	84,200,000	998,283,272	1,185.61
JUMLAH KEWAJIBAN	1,082,483,272	84,200,000	998,283,272	1,185.61
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	676,145,753,786	674,560,937,728	1,584,816,058	0.23
JUMLAH EKUITAS	676,145,753,786	674,560,937,728	1,584,816,058	0.23
JUMLAH EKUITAS	676,145,753,786	674,560,937,728	1,584,816,058	0.23
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	677,228,237,058	674,645,137,728	2,583,099,330	0.38

Keterangan :
FINAL

BALIKPAPAN, 2 Mei 2025

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN PERHUBUNGAN UDARA

WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR

SATUAN KERJA : (465678) KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH VII

Tgl Data : 02/05/25 12:25 AM

Tgl Cetak : 02/05/25 7:51 AM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	674,560,937,728	678,503,031,150	(3,942,093,422)	(0.58)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(39,005,634,526)	(33,670,740,586)	(5,334,893,940)	15.84
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(22,914,310)	113,132,208	(136,046,518)	(120.25)
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	0
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(22,914,310)	113,132,208	(136,046,518)	(120.25)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	40,613,364,894	29,615,514,956	10,997,849,938	37.14
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	1,584,816,058	(3,942,093,422)	5,526,909,480	(140.2)
EKUITAS AKHIR	676,145,753,786	674,560,937,728	1,584,816,058	0.23

Keterangan :

FINAL

BALIKPAPAN, 2 Mei 2025

Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
ESELON I : (05) DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR
SATUAN KERJA : (465678) KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH VII

Tgl Data : 02/05/25 2:32 AM
Tgl Cetak : 02/05/25 7:49 AM
Halaman : 1
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	1,824,227,412	1,689,612,037	134,615,375	7.967
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	1,824,227,412	1,689,612,037	134,615,375	7.967
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	1,824,227,412	1,689,612,037	134,615,375	7.967
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	13,669,876,695	11,097,795,769	2,572,080,926	23.177
Beban Persediaan	525,511,842	623,481,956	(97,970,114)	(15.713)
Beban Barang dan Jasa	9,463,059,667	8,796,992,702	666,066,965	7.572
Beban Pemeliharaan	3,625,216,019	3,851,969,539	(226,753,520)	(5.887)
Beban Perjalanan Dinas	8,717,041,775	6,117,683,746	2,599,358,029	42.489
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
ESELON I : (05) DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR
SATUAN KERJA : (465678) KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH VII

Tgl Data : 02/05/25 2:32 AM

Tgl Cetak : 02/05/25 7:49 AM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	4,110,158,956	4,872,428,938	(762,269,982)	(15.645)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	40,110,864,954	35,360,352,650	4,750,512,304	13.435
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(38,286,637,542)	(33,670,740,613)	(4,615,896,929)	13.709
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	(718,997,201)	0	(718,997,201)	()
Pendapatan Pelepasan Aset	53,300,000	0	53,300,000	
Beban Pelepasan Aset	772,297,201	0	772,297,201	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	217	27	190	703.704
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	217	27	190	703.704
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(718,996,984)	27	(718,997,011)	(2,662,951.89)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(39,005,634,526)	(33,670,740,586)	(5,334,893,940)	15.844
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(39,005,634,526)	(33,670,740,586)	(5,334,893,940)	15.844

Keterangan :
 FINAL

BALIKPAPAN, 2 Mei 2025
 Penanggung Jawab UAKPA
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN

KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA
 WILAYAH VII

IMRON JAZULI
 NIP 197007111997031007

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 022
ESELON I : DITJEN PERHUBUNGAN UDARA 05
SATUAN KERJA : KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH VII 465678

Tgl Data : 02/05/25 2:32 AM
Tgl Cetak : 02/05/25 7:51 AM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	2,197,057,000	1,877,527,629	(319,529,371)	85.46	1,837,750,000	1,689,612,064	(148,137,936)	91.94
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	2,197,057,000	1,877,527,629	(319,529,371)	85.46	1,837,750,000	1,689,612,064	(148,137,936)	91.94
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	2,197,057,000	1,877,527,629	(319,529,371)	85.46	1,837,750,000	1,689,612,064	(148,137,936)	91.94
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	46,378,733,000	42,490,892,523	(3,887,840,477)	91.62	32,010,054,000	31,174,543,920	(835,510,080)	97.39
1. Belanja Pegawai	13,769,885,000	13,669,876,695	(100,008,305)	99.27	11,117,546,000	11,097,795,769	(19,750,231)	99.82
2. Belanja Barang	24,432,707,000	22,299,127,143	(2,133,579,857)	91.27	20,113,847,000	19,301,731,025	(812,115,975)	95.96
3. Belanja Modal	8,176,141,000	6,521,888,685	(1,654,252,315)	79.77	778,661,000	775,017,126	(3,643,874)	99.53
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 022
ESELON I : DITJEN PERHUBUNGAN UDARA 05
SATUAN KERJA : KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH VII 465678

Tgl Data : 02/05/25 2:32 AM
Tgl Cetak : 02/05/25 7:51 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	46,378,733,000	42,490,892,523	(3,887,840,477)	91.62	32,010,054,000	31,174,543,920	(835,510,080)	97.39
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

BALIKPAPAN, 2 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

IMRON JAZULI
NIP 197087111997031007



NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 1 JANUARI 2024 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA: 022
UNIT ORGANISASI : 05
WILAYAH/PROVINSI : 1600
SATUAN KERJA : 465678

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
KALIMANTAN TIMUR
KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH VII

Tgl. Cetak 05/05/2025 9:07 AM
lap_noraca_percobaan_sawal_akrual_salker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	181,554,182	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	114,400	0
0.0	131111	Tanah	600,937,678,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	45,307,129,104	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	72,212,896,035	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	5,823,965,116	0
0.0	134112	Irigasi	997,375,030	0
0.0	134113	Jaringan	2,801,566,720	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	39,894,308,657
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	9,162,274,144
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	3,958,949,285
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	257,946,784
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	427,861,989
0.0	162151	Software	1,007,600,000	0
0.0	163139	Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	84,200,000	0
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	1,007,600,000
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	84,200,000
0.0	391111	Ekuitas	0	674,560,937,728
JUMLAH			729,354,078,587	729,354,078,587

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN PERHUBUNGAN UDARA

WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR

SATUAN KERJA : (465678) KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH VII

Tgl Data : 02/05/25 2:32 AM

Tgl Cetak : 02/05/25 7:51 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	189,939,260	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	449,960	0
0.0	131111	Tanah	600,937,678,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	46,309,416,581	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	74,819,298,712	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	5,823,965,116	0
0.0	134112	Irigasi	1,186,365,236	0
0.0	134113	Jaringan	2,801,566,720	0
0.0	135111	Aset Tetap Renovasi	493,689,027	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	40,475,574,564
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	10,589,029,633
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	4,547,518,043
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	305,915,801
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	498,576,785
0.0	162151	Software	1,007,600,000	0
0.0	163139	Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	1,082,483,272	0
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	1,007,600,000
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	1,082,483,272
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	42,490,892,523
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	1,877,527,629	0
0.0	391111	Ekuitas	0	674,560,937,728
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	22,914,310	0
3.0	425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	53,300,000
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	95,052,412
3.0	425516	Pendapatan Jasa Kebandarudaraan	0	1,585,975,000
3.0	425519	Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	0	143,200,000
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	217
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	4,193,393,900	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	74,961	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	222,184,990	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	72,445,728	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	35,280,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	15,644,392	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	222,256,980	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	601,949,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	245,770,000	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	79,852,900	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	1,555	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN PERHUBUNGAN UDARA

WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR

SATUAN KERJA : (465678) KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH VII

Tgl Data : 02/05/25 2:32 AM

Tgl Cetak : 02/05/25 7:51 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	4,781,690	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	8,100,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	2,896,800	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	11,803,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	264,149,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	7,533,587,831	0
3.0	512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	155,703,968	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	2,419,613,300	0
3.0	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	9,052,650	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	5,292,000	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	82,896,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	2,404,040,588	0
3.0	521211	Beban Bahan	1,501,909,842	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	57,073,524	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	912,412,358	0
3.0	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	5,000,000	0
3.0	521253	Beban Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel	35,422,798	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	743,916,559	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	64,519,890	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	55,649,273	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	361,865,307	0
3.0	522141	Beban Sewa	804,395,578	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,678,606,232	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,501,309,171	0
3.0	523131	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	196,363,851	0
3.0	523133	Beban Pemeliharaan Jaringan	242,878,725	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	8,599,644,295	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	117,397,480	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1,889,800,726	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1,513,105,659	0
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	588,568,758	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	47,969,017	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	70,714,796	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	525,511,842	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	6,058,040	0
3.0	596111	Beban Pelepasan Aset	772,297,201	0
JUMLAH			777,436,055,978	777,436,055,978

Keterangan :
FINAL

BALIKPAPAN, 2 Mei 2025

Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN PERHUBUNGAN UDARA

WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR

SATUAN KERJA : (465678) KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH VII

Tgl Data : 02/05/25 12:25 AM

Tgl Cetak : 02/05/25 7:52 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	42,490,892,523
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	1,877,527,629	0
3.0	425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	53,300,000
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	95,052,412
3.0	425516	Pendapatan Jasa Kebandarudaraan	0	1,585,975,000
3.0	425519	Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	0	143,200,000
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	217
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	4,193,393,900	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	78,079	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	222,184,990	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	72,445,728	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	35,280,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	15,644,392	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	222,256,980	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	601,949,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	246,140,000	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	79,852,900	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1,555	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	4,781,690	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	8,100,000	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	2,886,800	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	11,803,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	264,149,000	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	7,533,587,831	0
3.0	512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	155,703,968	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	2,419,613,300	0
3.0	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	9,052,650	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	5,292,000	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	82,896,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	2,404,040,588	0
3.0	521211	Belanja Bahan	1,501,909,842	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	57,073,524	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	912,412,358	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	540,290,520	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	743,916,559	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	64,519,890	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	55,649,273	0
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	361,865,307	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR
SATUAN KERJA : (465678) KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH VII

Tgl Data : 02/05/25 12:25 AM

Tgl Cetak : 02/05/25 7:52 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_salker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	522141	Belanja Sewa	804,395,578	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,678,606,232	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,501,309,171	0
3.0	523131	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	196,363,851	0
3.0	523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	242,878,725	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8,599,644,295	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	117,397,480	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2,365,292,977	0
3.0	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4,156,595,708	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	3,118
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	370,000
JUMLAH			44,368,793,270	44,368,793,270

Keterangan :

FINAL

BALIKPAPAN, 2 Mei 2025

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022 **KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**
ESELON I : 05 **DITJEN PERHUBUNGAN UDARA**
WILAYAH/PROVINSI : 1600 **KALIMANTAN TIMUR**
SATUAN KERJA : 465678 **KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH VII**

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 05/05/25 9:12 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	53,300,000	0	53,300,000	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	28,467,000	95,052,412	0	95,052,412	333.9
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	28,467,000	148,352,412	0	148,352,412	521.14
4255	Pendapatan Jasa Transportasi, Komunikasi dan Informatika					
425516	Pendapatan Jasa Kebandarudaraan	2,031,290,000	1,585,975,000	0	1,585,975,000	78.08
425519	Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	137,300,000	143,200,000	0	143,200,000	104.3
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4255	2,168,590,000	1,729,175,000	0	1,729,175,000	79.74
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	217	0	217	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	217	0	217	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	2,197,057,000	1,877,527,629	0	1,877,527,629	85.46
	JUMLAH PENDAPATAN	2,197,057,000	1,877,527,629	0	1,877,527,629	85.46

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022
ESELON I : 05
WILAYAH/PROVINSI : 1600
SATUAN KERJA : 465678
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
KALIMANTAN TIMUR
KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH VII

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 05/05/25 9:20 AM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
 Tgl Data : 5/5/25 4:42 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1,986,188,000	4,218,102,000	4,193,393,900	0	4,193,393,900	99.41	24,708,100
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	98,000	79,000	78,079	3,118	74,961	94.89	4,039
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	222,667,000	236,250,000	222,184,990	0	222,184,990	94.05	14,065,010
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	72,296,000	73,260,000	72,445,728	0	72,445,728	98.89	814,272
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	40,320,000	35,280,000	35,280,000	0	35,280,000	100	0
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	1,382,000	15,720,000	15,644,392	0	15,644,392	99.52	75,608
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	209,007,000	222,257,000	222,256,980	0	222,256,980	100	20
511129	Belanja Uang Makan PNS	620,332,000	627,000,000	601,949,000	0	601,949,000	98	25,051,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	211,900,000	246,140,000	246,140,000	370,000	245,770,000	99.85	370,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	3,364,170,000	5,674,088,000	5,609,373,069	373,118	5,608,999,951	98.85	65,068,049
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	0	80,931,000	79,852,900	0	79,852,900	98.67	1,078,100
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0	4,000	1,555	0	1,555	38.88	2,445
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	0	5,208,000	4,781,690	0	4,781,690	91.81	426,310
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	0	8,100,000	8,100,000	0	8,100,000	100	0
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	0	2,970,000	2,896,800	0	2,896,800	97.54	73,200
511628	Belanja Uang Makan PPPK	0	13,434,000	11,803,000	0	11,803,000	87.86	1,631,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	0	110,647,000	107,435,945	0	107,435,945	97.1	3,211,055
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	200,000,000	268,538,000	264,149,000	0	264,149,000	98.37	4,389,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	200,000,000	268,538,000	264,149,000	0	264,149,000	98.37	4,389,000
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito							
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	6,375,518,000	7,560,000,000	7,533,587,831	0	7,533,587,831	99.65	26,412,169
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	0	156,612,000	155,703,968	0	155,703,968	99.42	908,032
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	6,375,518,000	7,716,612,000	7,689,291,799	0	7,689,291,799	99.65	27,320,201
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	9,939,688,000	13,769,885,000	13,670,249,813	373,118	13,669,876,695	99.27	100,008,305
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	2,799,300,000	2,425,869,000	2,419,613,300	0	2,419,613,300	99.74	6,255,700
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	8,500,000	9,900,000	9,052,650	0	9,052,650	91.44	847,350
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	120,000,000	6,000,000	5,292,000	0	5,292,000	88.2	708,000
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	278,040,000	119,400,000	82,896,000	0	82,896,000	69.43	36,504,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022
ESELON I : 05
WILAYAH/PROVINSI : 1600
SATUAN KERJA : 465678
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
KALIMANTAN TIMUR
KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH VII

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 05/05/25 9:20 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 5/5/25 4:42 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	2,377,161,000	2,418,752,000	2,404,040,588	0	2,404,040,588	99.47	12,711,412
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	5,583,001,000	4,977,921,000	4,920,894,538	0	4,920,894,538	98.85	57,026,462
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	956,592,000	1,732,141,000	1,501,909,842	0	1,501,909,842	86.71	230,231,158
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	249,300,000	208,350,000	57,073,524	0	57,073,524	27.39	151,276,476
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,954,245,000	1,674,173,000	912,412,358	0	912,412,358	54.5	761,760,642
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	3,160,137,000	3,614,664,000	2,471,395,724	0	2,471,395,724	68.37	1,143,268,276
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	670,000,000	541,836,000	540,290,520	0	540,290,520	99.71	1,545,480
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	670,000,000	541,836,000	540,290,520	0	540,290,520	99.71	1,545,480
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	750,000,000	750,000,000	743,916,559	0	743,916,559	99.19	6,083,441
522112	Belanja Langganan Telepon	120,000,000	96,000,000	64,519,890	0	64,519,890	67.21	31,480,110
522113	Belanja Langganan Air	120,000,000	60,000,000	55,849,273	0	55,849,273	92.75	4,350,727
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	341,000,000	395,914,000	361,865,307	0	361,865,307	91.4	34,048,693
522131	Belanja Jasa Konsultan	45,000,000	0	0	0	0		0
522141	Belanja Sewa	966,000,000	829,214,000	804,395,578	0	804,395,578	97.01	24,818,422
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	2,342,000,000	2,131,128,000	2,030,346,607	0	2,030,346,607	95.27	100,781,393
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,162,400,000	1,695,139,000	1,678,606,232	0	1,678,606,232	99.02	16,532,768
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,162,230,000	1,558,130,000	1,501,309,171	0	1,501,309,171	96.35	56,820,829
523131	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	100,000,000	197,142,000	196,363,851	0	196,363,851	99.61	778,149
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	165,000,000	243,032,000	242,878,725	0	242,878,725	99.94	153,275
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	2,589,630,000	3,693,443,000	3,619,157,979	0	3,619,157,979	97.99	74,285,021
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9,332,060,000	9,261,942,000	8,599,644,295	0	8,599,644,295	92.85	662,297,705
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	322,741,000	0	0	0	0		0
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	36,120,000	8,820,000	0	0	0	0	8,820,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	282,679,000	202,953,000	117,397,480	0	117,397,480	57.84	85,555,520
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	9,973,600,000	9,473,715,000	8,717,041,775	0	8,717,041,775	92.01	756,673,225
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	24,318,368,000	24,432,707,000	22,299,127,143	0	22,299,127,143	91.27	2,133,579,857
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	900,000,000	2,398,729,000	2,365,292,977	0	2,365,292,977	98.61	33,436,023

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022 **KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**
ESELON I : 05 **DITJEN PERHUBUNGAN UDARA**
WILAYAH/PROVINSI : 1600 **KALIMANTAN TIMUR**
SATUAN KERJA : 465678 **KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH VII**
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 05/05/25 9:20 AM
 Halaman : 3
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
 Tgl Data : 5/5/25 4:42 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	900,000,000	2,398,729,000	2,365,292,977	0	2,365,292,977	98.61	33,436,023
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2,527,844,000	5,777,412,000	4,156,595,708	0	4,156,595,708	71.95	1,620,816,292
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	2,527,844,000	5,777,412,000	4,156,595,708	0	4,156,595,708	71.95	1,620,816,292
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	3,427,844,000	8,176,141,000	6,521,888,685	0	6,521,888,685	79.77	1,654,252,315
	JUMLAH BELANJA	37,685,900,000	46,378,733,000	42,491,265,641	373,118	42,490,892,523	91.62	3,887,840,477